



**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN**

(Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

***ROLES OF COMMUNITY SELF-RELIANCE AGENCY (BKM) IN
NATIONAL URBAN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM***
*(A Descriptive Study in Jatimulyo Village, District of Kauman, Tulungagung
Regency)*

SKRIPSI

Oleh

**Imroatus Solekah
NIM 090910301023**

Dosen Pembimbing

**Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP 195609011985031004**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN**

(Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Imroatus Solekah

NIM 090910301023

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan;
2. *My Mom* (Ibuku) Nurjiana *and Dad* (dan Ayah) Supriyadi yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, bimbingan dan doanya ;
3. *My Sista* (Kakakku) N.Faridha Priatmaja dan keluarga kecilnya, *my sista* (Adikku) Intan Maskhurin, *my brother* (adikku) Bagus dan Wahyu serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doanya;
4. Guru-guruku dari TK hingga SMA serta Ibu dan Bapak dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidikku dan memberikan pelajaran serta pengalaman yang terbaik;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka”
(terjemahan surat Ar-Ra’du ayat 11)*

“Apapun yang terjadi, yang anda yakini adalah kekuatan anda
Apapun yang terjadi, anda harus tetap pada tujuan anda
Apapun yang terjadi, yang anda yakini adalah yang akan terjadi”
(Mario Teguh)**

*) www.quranterjemah.com. 2014. Ar-ra’du. <http://www.quranterjemah.com/?mod=quran.murotal.show&page=530> [diakses tanggal 7 Juni 2014]

***) <http://www.goodreads.com>. 2014. Mario teguh > quotes. http://www.goodreads.com/author/quotes/1142998.Mario_Teguh [diakses tanggal 7 Juni 2014]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatus Solekah

NIM : 090910301023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2015

Yang menyatakan,

(Imroatus Solekah)

NIM 090910301023

SKRIPSI

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN**

(Studi Deskriptif Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

Oleh

Imroatus Solekah

NIM 090910301023

Pembimbing:

Drs. Djoko Wahyudi, M. Si

NIP 195609011985031004

PENGESAHAN

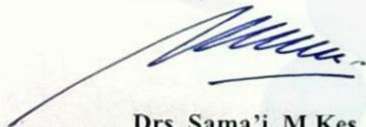
Skripsi berjudul “PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal :

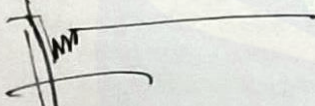
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

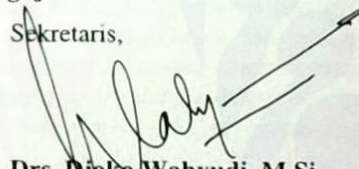


Drs. Sama'i, M.Kes
NIP. 195711241987021001
Anggota I,

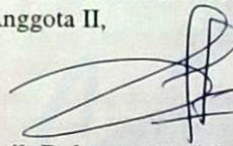


Drs. Partono, M.Si
NIP. 195608051986031003

Sekretaris,



Drs. Dipko Wahyudi, M.Si
NIP. 195609011985031004
Anggota II,

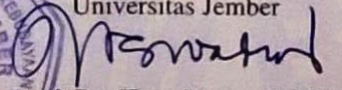


Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos
NIP. 197802142005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember




Prof. Dr. Harv Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif Di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) ; Imroatus Solekah, 090910301023; 2014: 90 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran dari BKM Mulyo Lestari yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Subjek penelitian ini adalah beberapa anggota BKM Mulyo Lestari yang telah lama bergelut sebagai BKM sebagai informan pokok, dengan informan tambahan kepala desa, fasilitator desa Jatimulyo dan masyarakat yang diwakili oleh anggota KSM. Dalam teknik pengambilan data menggunakan observasi partisipasi pasif dan observasi tersamar, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, disimpulkan bahwa peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) yaitu:

1. Mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif: mengorganisasikan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, melakukan peran koordinator dan fasilitator grup.
2. Dewan pengambilan keputusan: pengambil kebijakan, melakukan peran fasilitator dan perencana sosial),
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai, melakukan peran fasilitator
4. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan seperti: ekonomi. melakukan peran *reseacher, enebler dan broker*, lingkungan melakukan peran fasilitator dan sosial melakukan peran fasilitator dan broker.
5. Mengembangkan jaringan, melakukan peran broker.
6. Mengawasi proses pelaksanaan BLM, melakukan peran pengawas/broker-*quality control*.

Kata kunci: peran, BKM mulyo lestari

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segalanya.
2. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
3. Drs. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Drs. Partono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Djoko Wahyudi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, waktu dan saran dalam penulisan skripsi.
6. Drs. Sama'i, M.Kes, Drs. Partono, M.Si serta Ibu Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos, selaku Tim penguji skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta waktunya dalam penyelesaian dan perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial serta seluruh Dosen dan Karyawan FISIP Universitas Jember.
8. *My Family* (Keluargaku), *Mom and Dad you are my everything* (Ibu dan Ayah kalian adalah segalanya). Untukmu, Mama yang selalu percaya, mendoakan, sabar dan kasih sayangnya selalu menanyakan kesehatanku, kuliahku, skripsiku dan kebutuhanku selama di Jember. *My Dad* (Ayahku) yang selalu mendoakan, memperhatikan masa depan dan isi ATMku, berbagi pengalaman, dan selalu mengusahakan yang terbaik. Terimakasih.
9. Bapak Hury M.M dan staf Korkot PNPM MP Kabupaten Tulungagung, Mbak Erna, Mbak Ana dan Mas Totok serta Tim Faskel Kauman yang telah

memberikan izin dan meluangkan waktu membantu dan mensukseskan proses penelitian.

10. Camat Kauman dan Lurah Jatimulyo yang telah memberikan izin untuk penelitian serta Satpam Pemda Tulungagung, petugas perpustakaan BPS dan petugas BAKESBANGPOL Tulungagung yang telah sabar melayani dan membantu mendapatkan informasi terkait.
11. Keluarga besar PNPM MP Jatimulyo, PK BKM dan KSM Mulyo Lestari yang telah membantu dan memberikan izin penelitian.
12. Seluruh informan yang telah telaten, memberikan waktu, kepercayaan, keterbukaan dan ramah kepada peneliti dalam memberikan informasi dan data-data penelitian. Saya tidak akan pernah melupakan moment itu.
13. Teman-teman calon *professional social worker* angkatan 2009 (pekerja sosial profesional) dan seluruh angkatan. *Thanks* (Terimakasih) untuk semuanya.
14. Para sahabatku Iik, Luluk, Indah, Putri, Lia, Bitu, Mbak Yuli dan semuanya yang ada dirumah hijau. Terimakasih untuk semuanya selama di Jember.
15. Anak kos Jl. Bangka 2/18. Mbak Wilda, Mbak Yuri, Lila, Dinda, Pertiwi, Lucky Desi, Putri, Yolanda dan Desi. *Thanks* (Terimakasih) untuk segala kehebohan dan candanya selama ini.
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat	13
1.3.1 Tujuan	13
1.3.2 Manfaat	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)	14
2.2 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	15
2.2.1 Mengorganisasikan Warga Secara Partisipatif	16
2.2.2 Dewan Pengambilan Keputusan	17
2.2.3 Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Lihur	18

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Miskin	20
2.2.5 Mengembangkan Jaringan	21
2.2.6 Mengawasan Proses Pelaksanaan BLM	22
2.3 Peran Pekerja Sosial	22
2.4 Partisipasi	31
2.4.1 Tingkatan Partisipasi	33
2.5 Peran	34
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Alur Pikir Konsep Penelitian	35
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Penentuan Informan Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Observasi.....	47
3.5.2 Pengumpulan Data Dengan Wawancara.....	48
3.5.3 Dokumentasi	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
3.7 Teknik Keabsahan Data	52
BAB 4. PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Jumlah Penduduk	54
4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	55
4.1.3 Pendidikan	57
4.1.4 Pekerjaan Dan Mata Pencaharian Utama Penduduk	57
4.1.5 Kondisi Lingkungan	58
4.2 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mulyo Lestari	59
4.2.1 Profile BKM Mulyo Lestari	60

4.2.2 Visi dan Misi BKM Mulyo Lestari	63
4.2.3 Struktur Organisasi BKM Mulyo Lestari	64
4.3 Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan	66
4.3.1 Mengorganisasikan Masyarakat Secara Partisipatif: Pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif	67
4.3.2 Dewan Pengambilan Keputusan	71
4.3.3 Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur	73
4.3.4 Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	75
a. Ekonomi	76
b. Lingkungan	78
c. Sosial	80
4.3.5 Mengembangkan Jaringan	83
4.3.6 Mengawasi Proses BLM	85
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian	41
Tabel 3.2 Informan Pokok	42
Tabel 3.3 Informan Tambahan	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo Tahun 2013	55
Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2013	55
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2013	56
Tabel 4.4 Kualitas Pendidikan Tahun 2013	57
Tabel 4.5 Pekerjaan dan Mata Pencaharian Utama Penduduk Tahun 2013	58
Tabel 4.6 Data Anggota BKM Mulyo Lestari Masa Bakti Tahun 2013 ...	61
Tabel 4.7 Fungsi Berdasarkan Pada Struktur Keorganisasian BKM Mulyo Lestari	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Alur Pikir Penelitian	36
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data	51
Gambar 4.1 Peta Desa Jatimulyo	54
Gambar 4.2 Mekanisme Proses Pengambilan Keputusan	62
Gambar 4.3 Kriteria Warga yang Masuk Pemetaan Swadaya	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Telaah penelitian terdahulu
- Lampiran 2. Taksonomi penelitian
- Lampiran 3. Pedoman wawancara
- Lampiran 4. Transkrip reduksi
- Lampiran 5. Dokumentasi penelitian
- Lampiran 6. Program kerja BKM Mulyo Lestari 2013
- Lampiran 7. Struktur organisasi BKM Mulyo Lestari 2013
- Lampiran 8. Siklus PNPM MP
- Lampiran 9. Struktur organisasi pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan
- Lampiran 10. Surat tugas pembimbing
- Lampiran 11. Surat izin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lampiran 12. Surat izin penelitian dari BAKESBANGPOL Tulungagung
- Lampiran 13. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 14. Surat iji penelitian dari Kecamatan Kauman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia adalah bagian dari *developing country* atau negara sedang berkembang di kawasan asia. Negara berkembang sendiri adalah sebutan untuk negara-negara didunia yang belum memenuhi kriteria sebagai negara maju. Negara-negara berkembang memiliki masalah yang hampir sama yaitu masalah tingkat kehidupan yang rendah. Hal ini juga diamini oleh Todaro dan Smith yang menjelaskan dalam salah satu karakteristik negara berkembang, mereka berpendapat bahwa negara berkembang berhubungan erat dengan tingkat kehidupan yang rendah (Muller 2006:13). Standar hidup yang rendah ini akan menyeret pada kemiskinan, karena jika hal ini terjadi sudah pasti mereka yang berada diposisi ini akan mengalami beberapa hal seperti kekurangan finansial untuk mendukung kehidupannya. Merphin (2000:7) menjelaskan bahwa standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, pendidikan dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Kemiskinan memang hal yang lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Prayitno dan Arsyad (1987:36) ada 5 ciri-ciri kemiskinan, meliputi: mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti lahan yang cukup, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah, banyak dari mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada tanah yang mereka miliki sangat kecil. Dari kriteria kemiskinan diatas maka kebutuhan seseorang untuk dapat menjalani hidup harus didukung dengan kepemilikan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Secara umum kemiskinan di Indonesia memang di dominasi pedesaan, namun angka kemiskinan di perkotaan tidak dapat diremehkan. Indonesia-Investments dalam laporannya menyebutkan bahwa sejak pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu

sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota). (Diakses pada tanggal 9 oktober 2014 <http://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301>).

Beban seseorang yang hidup dengan kemiskinan diperkotaan menghadapi masalah yang lebih sulit dibandingkan jika dipedesaan. Sebagai gambarannya adalah seseorang yang miskin dipedesaan tetap bisa mengenyangkan perut dan menjalani hidup dengan memanfaatkan alam disekitarnya hal ini dipermudah dengan kebutuhan hidup dipedesaan yang tak setinggi di kota, hal lain jika terjadi dikota, seseorang yang miskin membutuhkan uang untuk sekedar mengenyangkan perut. Menurut World Bank (2003:30) menjelaskan Kemiskinan diperkotaan ditandai oleh tingginya pengangguran yang diikuti dengan peningkatan tekanan sosial terhadap masyarakat kota, yang selanjutnya mengakibatkan tingginya kerentanan terhadap kemiskinan. Akibat kemiskinan, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, memiliki hak terbatas terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan. Dari penjelasan world bank tersebut maka orang miskin diperkotaan harus mejalani hidupnya dalam kondisi serba terbatas. Respon atas kejadian ini adalah dengan penanggulangan kemiskinan diperkotaan, sehingga pemerintah meluncurkan program khusus yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

PNPM MP yang diadopsi dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP diadakan dengan tujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. PNPM MP dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat miskin diperkotaan dan masyarakat secara umum melalui pinjaman modal, pembinaan kelompok masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program yang ada. Pelaksanaan program PNPM MP memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur, pengelolaan

dana bergulir bagi masyarakat, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah operasi PNPM MP. Seperti yang tertulis pada buku pedoman pelaksanaan PNPM MP tahun 2012, bahwa program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan stimulan berupa kegiatan intervensi yang mengarah ke perubahan perilaku. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (*channelling program*) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:6)

Suksesnya suatu program membutuhkan peran para pelaku atau pelaksananya agar program tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan berbagai kegiatan PNPM Mandiri sebagian besar akan ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku-pelaku PNPM lainnya. (Departemen Pekerjaan Umum, 2008). Dalam prakteknya untuk mewujudkan tujuan PNPM MP, disusunlah organisasi yang disesuaikan dengan tingkatan pelaksana PNPM MP ditataran masyarakat untuk memudahkan alur koordinasi dan pelaksanaan program tersebut. Organisasi ini secara struktur berada di bawah Pokja pengendalian PNPM Mandiri Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (*executing agency*) lewat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan PNPM MP. Kemudian Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk PMU (*Project Management Unit*) sebagai pihak yang melaksanakan PNPM MP. Dalam pelaksanaan dilapangan, PMU mengontrak konsultan manajemen pusat (KMP) untuk memenejemen proyek secara menyeluruh dan menyelenggarakan menejemen konsultan (OC/KMW) yang juga akan ditugaskan ditiap wilayah kerja. Selanjutnya, ditiap wilayah kerja PNPM MP akan ditangani oleh satu konsultan manajemen wilayah. Sedangkan untuk kabupaten/kota akan dipimpin oleh seorang Korkot yang dibantu oleh beberapa ahli

dalam bekerja. Untuk tingkat kelurahan/desa akan dibantu oleh tim fasilitator yang bertanggung jawab secara langsung kepada karkot. Pelaksana tingkat kelurahan/desa sendiri pelaksana utama kegiatan PNPM MP adalah Pemdes, relawan masyarakat, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam prakteknya antara pemdes, relawan dan BKM meskipun sama-sama dikatakan sebagai pelaksana program namun mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Letak perbedaan ketiganya adalah pemdes berperan sebagai penjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya, seperti yang di ungkapkan dalam jurnal Nasution Vol 1, No 1 (2013) yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan”. Sementara relawan berperan membantu pengelolaan pembangunan dan BKM berperan sebagai *executive agency* dan menjalankan fungsi managerial dari organisasi bentukan PNPM MP ditingkat desa/kelurahan.

BKM adalah salah satu pelaksana program PNPM MP. Keberadaan BKM bukan muncul begitu saja, BKM adalah respon dari kebutuhan masyarakat akan suatu wadah yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam PNPM MP. Dalam hal ini BKM hadir berbentuk organisasi warga yang bersifat pimpinan kolektif. PNPM MP sendiri mewajibkan dalam salah satu tahapan siklusnya untuk melakukan pembentukan organisasi ini sebagai hasil dari dilaksanakannya pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini bukanlah sebagai tempat berorganisasi masyarakat setempat tetapi lebih ke wadah pemersatu warga wilayah tersebut secara bersama-sama bersatu menanggulangi kemiskinan diwilayahnya. Mengenai pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial juga dikenal sebagai pengembangan masyarakat. Brokensha dan Hodge dalam Adi (2008:204), pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Ife (1995) dalam *Community Development; Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice*; menjelaskan pengembangan masyarakat

(*Community Development*), lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat sendiri (*community-base service*) dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan (*self-reliance*) masyarakat. Sedangkan Glen dalam Adi (2003:224) menggambarkan bahwa ada tiga unsur khas yang mendasari pengorganisasian masyarakat yaitu:

- a. Tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.
- c. Praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif.

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa sebagai sebuah organisasi warga, peran BKM yang ingin di dapatkan bukan berakhir dengan hanya menjalankan program-program secara administratif dan organitatif sebagai formalitas belaka lebih dari itu sebagai pelaksana program BKM juga harus berperan untuk memampukan masyarakat dalam mendeteksi kebutuhannya secara tepat, menyatukan warga, menumbuhkan partisipasi aktif dan inisiatif warga sebagai proses dari pemberdayaan. Dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012:81) disebutkan beberapa peran BKM sebagai berikut :

- a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;
- b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
- c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
- d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
- e. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;

- f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

BKM bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam hal proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk keperluan pengembangan keswadayaan masyarakat secara khusus pada penanggulangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat secara umum. Dalam tesisnya, Erwin Permana 2010 : viii) menyebutkan bahwa program PNPM Mandiri menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Di Jawa Timur, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung termasuk daerah yang melaksanakan dan mendukung program PNPM MP. Desa Jatimulyo menjadi penerima program PNPM MP karena memiliki KK miskin 10%. Hal ini di perjelas dengan keterangan H selaku karkot PNPM MP Tulungagung saat peneliti melakukan observasi pada bulan Agustus 2013 sebagai berikut:

Informan H

“Benar di Tulungagung telah dilaksanakan PNPM MP kegiatannya sudah berjalan dari sekitar tahun 2008 untuk PNPM MP yang dulunya adalah P2KP. Untuk Kecamatan Kauman seperti yang ada di surat keputusan, kita ada di Jatimulyo, Bolorejo, Banaran dan hampir semua wilayah Kecamatan Kauman itu kita ada PNPM MP”

Desa Jatimulyo merupakan wilayah paling utara di Kecamatan Kauman berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Karangrejo. Desa Jatimulyo termasuk wilayah strategis karena letaknya yang berada di percaturan transportasi yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Kauman dan Karangrejo. Namun karena tingkat kesadaran pendidikan yang masih rendah dan kurang memadainya fasilitas umum maka berefek pada jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, BKM Mulyo Lestari memiliki program-program yang disesuaikan dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan ala PNPM MP yang dikenal dengan Tridaya. Tridaya sendiri terdiri dari tiga kemampuan yaitu kemampuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi. (Pedoman Teknis Pelaksanaan Tridaya, tanpa tahun). PNPM MP Jatimulyo secara penuh mengadopsi dari PNPM Mandiri. Kegiatan Tridaya di Jatimulyo sudah diselenggarakan oleh BKM sejak P2KP dan masih berlanjut dengan program yang sama saat menjadi PNPM MP. Perlu diketahui bahwa PNPM MP Desa Jatimulyo adalah lanjutan dari P2KP yang berubah menjadi PNPM MP secara penuh pada tahun 2008. Kegiatan Tridaya yang ada di Desa Jatimulyo secara umum berjalan dengan lancar, adapun kegiatan Tridaya di desa ini periode tahun 2013 seperti ekonomi bergulir untuk daya ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi bergulir, masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat menerima pinjaman modal usaha melalui KSM. Pada tahun 2013, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang telah direalisasikan sebanyak Rp. 3.750.000 untuk tahap pertama, tahap kedua sebanyak Rp. 7.750.000. Untuk kegiatan sosial, PNPM MP Desa Jatimulyo memiliki kegiatan unggas bergulir, sarana produksi sari kedelai, penggemukan kambing, beasiswa dan ternak puyuh. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan sendiri, pelaksanaan paving jalan, pembangunan saluran air, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pelaksanaan kegiatan PKM yang diberikan untuk pelatihan KSM dan pelatihan RT/RW. Tidak dipungkiri berbagai kegiatan pemberdayaan seperti Tridaya yang dilaksanakan oleh PNPM MP Jatimulyo tidak akan bisa berjalan mulus tanpa campur tangan dari BKM Mulyo lestari, BKM Mulyo Lestari adalah sebuah lembaga representatif masyarakat

yang dibentuk oleh masyarakat yang ada di Jatimulyo. Selain sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat, keberadaan BKM juga merupakan syarat untuk mendapatkan dana bantuan PNPM MP. Rutinitas BKM Mulyo Lestari adalah menjalankan dan mengelola kegiatan pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan di desa/kelurahan dengan acuan program kerja dan PJM yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Desa inilah yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian. Pada observasi awal yang penulis lakukan kelokasi pelaksanaan program PNPM MP di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, masyarakat sebagai sasaran dari program lebih berdaya dari sebelumnya. Adanya program Tridaya yaitu daya ekonomi, lingkungan dan sosial mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selayaknya sebuah program PNPM MP memiliki kesulitan untuk mempromosikan dan mengelola programnya secara baik, misalnya seperti pelaksanaan termin 1 pada tahun 2008 untuk program lingkungan BKM Mulyo Lestari harus berusaha keras mengubah pemikiran masyarakat tentang pelarangan pengambilan/penggunaan bahan baku program lingkungan yang ada di dekat rumah warga untuk konsumsi pribadi (masyarakat). Keadaan ini tidak menjadi hambatan untuk BKM Mulyo Lestari tetap menjalankan program-program PNPM MP. Secara umum, pelaksanaan program-program PNPM MP di wilayah ini cukup berjalan lancar dan berhasil.

Menurut keterangan salah satu informan yang peneliti temui saat observasi, yaitu informan C selaku Perangkat desa di Jatimulyo, dalam menyelenggarakan program PNPM MP ini yaitu BKM Mulyo Lestari pernah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi pada tahun 2010. Dengan didapatnya penghargaan ini membuktikan bahwa BKM Mulyo Lestari telah teruji. Reward dari penghargaan ini adalah BKM Mulyo Lestari mendapatkan suntikan dana sebesar 1 Milyard yang boleh digunakan untuk membiayai programnya. Menurut keterangan informan C, dana tersebut akhirnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan PLPBK. Dalam wawancara observasi dengan informan C, peneliti mendapat informasi bahwa BKM ini memiliki program

Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) yang berbentuk pelatihan untuk masyarakat yang telah terdaftar sebagai KSM seperti pelatihan pengelolaan usaha dan pembuatan pakan ternak.

Observasi awal yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa BKM Mulyo Lestari cukup berperan dan berusaha keras menjalankan program-program PNPM MP. Namun demikian belum diketahui secara jelas bagaimana mereka berperan. Penelitian ini berfokus pada BKM Mulyo Lestari dikarenakan BKM Mulyo Lestari adalah salah satu pelaku PNPM MP Jatimulyo yang terpisah dari lembaga agama maupun lembaga pemerintahan. Jadi bisa dikatakan BKM adalah lembaga yang mandiri. Pelaku PNPM MP tingkat desa/kelurahan memang bukan hanya BKM tetapi masih ada Pemdes dan relawan masyarakat, diantara ketiganya BKM adalah yang paling lengkap yaitu sebagai lembaga/orgaanisasi masyarakat yang merepresentasikan masyarakat diwilayahnya, menjalankan fungsi managerial dari organisasi bentukan PNPM MP ditingkat desa/kelurahan dan sebagai *executive agency*.

Menarik untuk diteliti, selain karena program ini adalah kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat miskin di perkotaan, ternyata menurut fasilitator yang mendampingi PNPM MP Jatimulyo, tingkat partisipasi masyarakat Jatimulyo lebih tinggi dibandingkan wilayah dampingan yang lain, informasi ini peneliti dapatkan dari wawancara dengan salah satu fasilitator yang mendampingi Jatimulyo yaitu sebagai berikut:

Informan AN

“Kalau peran partisipasi masyarakat *nggih* (iya) ditingkatan basis maupun kelurahan itu cukup bagus di Jatimulyo dibandingkan sebelah. Artinya masyarakat juga aktif *ngoten nggih* (begitu yah). Dari segi partisipasi perempuan maupun laki-laki yang terlibat mulai basis sampai ditingkatan kelurahan”.

Selain itu partisipasi dan respek anggota BKM Mulyo Lestari masih unggul dibanding wilayah dampingan yang lain. Seperti yang dikatakan informan T berikut:

Informan T

“Ee partisipasi masyarakat Jatimulyo cukup baik mbak, malah yang tua-tua itu juga masih ikut peduli dan mengabdikan (di BKM)”

Hasil studi literatur yang peneliti peroleh dari hasil penelitian dari Muhammad Zulfadli Nasution (2013) dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Medan dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan”, menggambarkan peran dari kepala desa dalam meningkatkan pembangunan diwilayahnya melalui PNPM Mandiri. Penelitian kedua adalah penelitian dari Erwin Permana (2010) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Study Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok). Dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa Keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri di suatu kelurahan sangat tergantung pada kinerja pimpinan kolektif LKM. Sedangkan institusi LKM akan berkembang mencapai kemandirian tergantung pada sejauhmana kemampuan pimpinan kolektif secara bersama-sama mengelola institusi LKM secara lebih profesional. Perbedaan antara LKM dan BKM hanyalah pada penggunaan nama, BKM adalah nama lain LKM yang digunakan pada saat P2KP dan berubah menjadi LKM saat menjadi PNPM MP. Maka dari itu, dengan mendasarkan dari latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti tentang, “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”.

Hubungan mengenai Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah sangat berkaitan, karena dari segala upaya yang dilakukan BKM Mulyo Lestari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang dalam hal ini masyarakat masih kurang dari sejahtera dan kekurangan seperti infrastruktur maupun kebutuhan dasar. BKM Mulyo Lestari bekerja

membantu kelompok/masyarakat sasaran melalui serangkaian intervensi yang tertuang kedalam program-program pemberdayaan yang ada di PNPM MP. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MP yaitu menempatkan masyarakat sebagai aktor, pengelola dan sebagai penanggung jawab kegiatan. Kelompok sasaran dalam PNPM MP adalah masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Bila kita melihat kebelakang, ternyata asal usul anggota BKM Mulyo Lestari adalah masyarakat sasaran yang juga berhak hidup sejahtera. Sebagian anggota BKM Mulyo Lestari di desa Jatimulyo juga masih hidup dalam kesulitan. Adi (2007:27), mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan *alternative* solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam penjelasan tersebut tersirat bahwa partisipasi yang diharapkan adalah bukan hanya sebatas pada kedatangan masyarakat dalam program tetapi masyarakat diharapkan keikutsertaannya dalam proses identifikasi masalah dan potensi mereka, mampu menangani masalah dan solusinya serta melakukan fungsi evaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan BKM ditujukan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan mewujudkan aspirasi warga ditingkat kelurahan dengan anggota yang berasal dari masyarakat setempat dengan beberapa persyaratannya. Persyaratan anggota BKM harus dari warga setempat sasaran program hal ini sesuai dengan konsep program PNPM yaitu pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.

BKM merupakan sebuah lembaga masyarakat yang penting dan paling lengkap di antara pelaksana PNPM MP tingkat bawah. Karena BKM adalah sebagai

lembaga/orgaanisasi masyarakat yang merepresentasikan masyarakat Jatimulyo, menjalankan fungsi managerial dari organisasi PNPM MP ditingkat desa/kelurahan dan sebagai *executive agency*. Tanpa adanya BKM maka program PNPM MP tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum BKM berperan untuk mensejahterakan masyarakat, namun juga harus berperan untuk memampukan masyarakat dalam mendeteksi kebutuhannya secara tepat, menyatukan warga, menumbuhkan partisipasi aktif dan inisiatif warga sebagai proses dari pemberdayaan.

Fenomena yang berhasil ditangkap oleh penulis berdasarkan pada observasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa BKM Mulyo Lestari cukup berusaha keras dan berperan dalam kegiatan PNPM MP. BKM Mulyo Lestari terdiri dari 13 orang yang semuanya adalah masyarakat setempat dengan komposisi 5 orang wanita dan sisanya adalah laki-laki, mereka bersama-sama menjalankan program sesuai dengan proker dan PJM yang telah disepakati. Selayaknya sebuah program PNPM MP memiliki kesulitan untuk mempromosikan dan mengelola programnya secara baik, misalnya seperti pelaksanaan termin 1 pada tahun 2008 untuk program lingkungan BKM Mulyo Lestari harus berusaha keras mengubah pemikiran masyarakat tentang pelarangan pengambilan/penggunaan bahan baku program lingkungan yang ada di dekat rumah warga untuk konsumsi pribadi (masyarakat). Keadaan ini tidak menjadi hambatan untuk BKM Mulyo Lestari tetap menjalankan program-program PNPM MP. Secara umum, pelaksanaan program-program PNPM MP di wilayah ini cukup berjalan lancar dan berhasil. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana usaha BKM Mulyo Lestari dengan perannya dalam PNPM MP di Jatimulyo.

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, khususnya adalah peran dari BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada

pemainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah tugas yang dilaksanakan oleh BKM Mulyo Lestari. Peran yang dimaksud disini adalah mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif, dewan pengambil keputusan, mempromosikan nilai-nilai luhur, menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin seperti pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan, mengembangkan jaringan dan mengawasi proses pelaksanaan BLM.

Melihat fenomena yang ada pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)?”.

Berpijak dari rumusan masalah tersebut fokus penelitian yang menjadi pembatas agar penelitian yang dilakukan tidak meluas atau melenceng dari tujuan awal penelitian ini antara lain adalah Penelitian ini hanya berfokus pada BKM Mulyo Lestari periode tahun 2012/2013.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dari penjelasan dalam latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

“Mendeskripsikan tentang Peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung”.

1.3.2 Manfaat

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam hal Peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
3. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan kajian bagi lembaga khususnya tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar yang dipergunakan dalam suatu kerangka penelitian. Dan berdasarkan pemikiran untuk merancang jalannya proses penelitian serta menerangkan fenomena lainnya yang menjadi pusat perhatian. Landasan teori merupakan kerangka dasar yang dapat digunakan dalam berfikir manusia untuk melakukan suatu aktifitas, khususnya dalam pemecahan masalah. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori-teori tersebut menjadi kerangka berpikir dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian, yaitu “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Terkait dengan penelitian ini maka konsep yang akan dibahas adalah:

2.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)

PNPM MP adalah salah satu program pemerintah yang diterapkan di negeri ini. Memiliki sebuah tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman di Perkotaan khususnya Kelurahan atau desa yang menjadi peserta program, PNPM akan menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat serta kebutuhannya. Selain itu, mereka menggunakan partisipasi aktif masyarakat peserta program untuk menjalankan program-programnya. Program ini berorientasi membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah intervensi pada perubahan sikap atau perilaku atau cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Tahap selanjutnya adalah membangun transformasi menuju masyarakat mandiri sebagai

oreintasinya. Dengan intervensi-intervensi seperti pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak. Selain itu, juga terdapat transformasi kondisi sosial dengan tujuan mengembangkan kualitas lingkungan pemukiman yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam pnpm mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM MP. Saat ini pelaksanaan PNPM MP telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu kelompok swadaya masyarakat (KSM). (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:6).

2.2 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM telah bekerja, maka dilokasi tersebut sudah terbentuk BKM sebagai dewan amanah atau pimpinan kolektif himpunan masyarakat warga setempat (kelurahan/desa). BKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa pada umumnya. (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:81) BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan. (Departemen Pekerjaan Umum, Tanpa Tahun). Terbentuknya BKM merupakan kesadaran masyarakat akan masalahnya dan merupakan salah satu tahapan siklus awal PNPM MP yang disiapkan untuk menjadi sebuah lembaga yang representatif dan mengakar di masyarakat. Dengan adanya lembaga ini di harapkan tujuan PNPM MP untuk menanggulangi

kemiskinan dengan berbagai intervensi program-program pemberdayaannya akan tercapai. Sebagai sebuah lembaga BKM berada diluar lembaga desa atau pemerintah, militer maupun agama. Saat ini BKM dipimpin oleh seorang pemimpin kolektif untuk memudahkan arah koordinasi. Anggota BKM merupakan masyarakat lokal yang membantu menjalankan kegiatan PNPM MP di wilayah tersebut dimana semua anggota BKM dipilih melalui tahapan pemilu yang demokratis dari tingkatan RT, RW, dusun dan kelurahan. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota BKM, kriterianya adalah jujur, amanah, dapat dipercaya, punya kepedulian terhadap orang miskin. Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat warga penduduk kelurahan/desa dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan (*steering*) kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut. Jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak terlibat dengan kegiatan praktis – pelaksanaan (*rowing*) karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan (Departemen Pekerjaan Umum, Tanpa Tahun). BKM memiliki beberapa peran, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.2.1 Mengorganisasikan Warga Secara Partisipatif

Salah satu peran BKM adalah mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif untuk menurumuskan program-program jangka menengah PNPM MP. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebagai dana untuk pembiayaan program-program yang telah disepakati. Mengorganisasikan atau *organizing* sendiri dalam kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat ke dalam suatu forum, kemudian di dalam forum inilah kegiatan mengumpulkan pendapat dan kebutuhan terutama masyarakat miskin di gali, dilakukan survei dan selanjutnya dikategorikan kebutuhan prioritas. Dalam kegiatan ini partisipasi masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif sangat dibutuhkan. Menurut KBBI online (<http://kbbi.web.id/organisasi> diakses pada tanggal 15 September 2014) mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun bagian (orang dsb) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Lebih lanjut Ross

Murray (2000) menjelaskan pengorganisasian masyarakat adalah Suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan - kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan - kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan - kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber - sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong. Bila dilihat dari beberapa penjelasan di atas maka pengorganisasian masyarakat yang dilakukan BKM mengarah pada kegiatan untuk menyadarkan, mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengelola masalah beserta solusi atau jalan keluarnya.

2.2.2 Dewan Pengambilan Keputusan

Dalam sumber online (<http://www.psiologizone.com/decision-making-pengambilan-keputusan/06511842>) diakses pada tanggal 15 September 2014) mengatakan pengambilan keputusan (*decision making*) dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana anggota organisasi memilih mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap peluang atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya Beach & Connolly, 2005 (dalam Moordiningsih Jurnal Psikologi Volume 33, No 2,1 – 15) mengatakan bahwa Pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu peristiwa yang meliputi diagnosa, seleksi tindakan dan implementasi. William R. Dill (dalam *National Society For The Study Of Education* halaman 201) dalam *glossary of administration* pembuatan keputusan (*decision making*) didefinisikan sebagai: “*a process in which choicers are made to change (or leave unchanged) an existing condition, to select a course of action most appropriate to achieving a desired objective, and to minimize risks, uncertainty, and resource expenditures in pursuing the objective*, (suatu proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah (atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencari suatu tujuan yang diinginkan, dan untuk mengurangi resiko-resiko, ketidakpastian dan pengeluaran sumber-sumber dalam

rangka mengejar tujuan). Pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengambilan keputusan maka pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan yang sengaja diambil dan dipilih berdasarkan pada alternatif berbagai pertimbangan sekaligus pertimbangan secara sadar akan baik dan buruknya suatu keadaan untuk mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan dalam BKM pada dasarnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang biasa dilakukan secara langsung. Musyawarah mufakat adalah suatu perundingan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memecahkan sekaligus menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Dalam proses musyawarah ini dibutuhkan komunikasi yang baik agar proses musyawarah dapat berjalan.

2.2.3 Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-nilai Luhur (Jujur, Adil, Transparan, Demokratis)

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:81). . Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur merupakan bagian dari upaya menyebarkan dan mendidik masyarakat untuk menjadi karakter yang baik. BKM dituntut untuk dapat melaksanakan dan memberikan contoh nyata di masyarakat melalui penerapan nilai-nilai luhur tersebut kedalam dirinya baik saat menjalankan program maupun dalam keseharian. Selain itu secara tidak langsung kegiatan ini juga mendidik lembaga setempat seperti pemerintah desa untuk mampu melakukan hal serupa karena selain masyarakat pemerintah desa adalah mitra abadi BKM. Dalam KBBI online (diakses pada tanggal 15 September 2014) menyebutkan bahwa jujur adalah tidak bohong, lurus hati, dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat. Suatu perbuatan dapat dikatakan jujur jika sesuai dengan kebenaran. Albert Hendra Wijaya, 2008 (dalam <http://www.unja.ac.id/fkip/index.php/kehidupankampus/opini-danartikel/117-penanaman-nilai-nilai-kejujuran> diakses pada tanggal 17 September

2014) menyebutkan bahwa “Jujur” jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Masih dalam sumber yang sama, Esmoda, 2013 (dalam <http://www.unja.ac.id/fkip/index.php/kehidupankampus/opinidanartikel/117-penanaman-nilai-nilai-kejujuran> diakses pada tanggal 17 September 2014), mengatakan bahwa Jujur adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Selain jujur, masih ada adil, transparan dan demokrasi juga menjadi sikap yang di harapkan dalam pelaksanaan PNPM MP. Dengan berlaku adil dan demokratis diharapkan akan menghasilkan keadilan (*equity*) di masyarakat. Keadilan ini akan bermanfaat dan dibutuhkan penggunaannya seperti saat dilaksanakan forum warga atau rembuk warga, dimana BKM sebagai pemimpin kolektif dituntut untuk mengatur jalannya forum sekaligus berlaku adil dengan menyamaratakan kedudukan masyarakat tanpa memandang gender maupun status sosial dalam menyampaikan aspirasi di forum tersebut karena tidak dipungkiri dalam proses ini akan terjadi benturan kepentingan sesama masyarakat desa. Penegakan nilai keadilan yang dilakukan BKM sesuai dengan salah satu karakteristik *good governance* dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu prinsip berkeadilan (*equity*) yang berbunyi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Dalam Darmodiharjo (2006:161), Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar. Keadilan dalam PNPM MP belum berhenti disini tetapi juga dalam keadilan masyarakat untuk mendapat informasi yang aktual berupa laporan-laporan kegiatan maupun keuangan. Hal ini terwujud jika BKM melaksanakan fungsi transparansi dalam lembaganya, transparansi biasanya berhubungan erat dengan masalah pengelolaan keuangan suatu lembaga. Menurut Ratminto dan Winarsih (2005:19) bahwa transparansi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam BKM untuk meningkatkan kepercayaan, menguatkan ikatan dan kerjasama di antara mitra yaitu BKM dan masyarakat. Lebih dari itu dengan melandaskan prinsip ini akan mendidik BKM untuk lebih meningkatkan perannya khususnya untuk tidak bertindak sendiri sebagai kumpulan orang yang paling mengetahui dan mengerti dalam membuat keputusan terkait program-program yang beredar dimasyarakat tanpa melihat dan mendengar aspirasi masyarakat dengan mengingat kembali fungsi utama keberadaan BKM adalah sebagai *steering* kegiatan PNPM MP.

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Suharto (2005:59), Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Payne menjelaskan (dalam Fahrudin, 2011) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:30), pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupan yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan kata lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekaya pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang memiliki proses dan tujuan menguatkan kekuasaan dan keberdayaan kelompok atau masyarakat lemah agar mampu mendapatkan akses pada kebutuhan dasar, ekonomi, politik dan berpartisipasi di dalam pembangunan diri mereka. Sehingga tercapai kehidupan yang mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM MP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam program Tridaya yaitu daya ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.2.5 Mengembangkan Jaringan

Suatu pekerjaan akan lebih cepat jika dikerjakan secara bersama-sama, begitu juga dalam PNPM MP memerlukan pihak lain untuk mempercepat dan membantu agar programnya bisa berjalan. Mengembangkan jaringan atau dikenal dengan istilah *channeling* dalam PNPM MP merupakan salah satu kegiatan BKM untuk mengkondisikan agar BKM mampu mencukupi dirinya dengan bantuan pihak luar dalam bentuk bantuan atau kerjasama. Pelaksanaan program *channeling* merupakan salah satu bukti kemandirian dalam BKM. Dalam hal *channeling* ini BKM bisa melakukan kerja sama baik dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Menurut Sargent (dalam Santoso, 1999). Kerjasama merupakan suatu usaha terkoordinasi yang diarahkan menuju suatu tujuan. Walker (1992) menjelaskan bahwa kerjasama dalam bekerja ditujukan untuk mencapai keberhasilan dengan tidak mendasarkan pada kepentingan pribadi tetapi lebih utama untuk kepentingan bersama

menyamakan kepentingan dengan yang lain yang bersifat kepercayaan mutualistik dengan tujuan akhir kerjasama yang efektif.

2.2.6 Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Astuti (2003:162) menjelaskan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan. Jadi kegiatan monitoring ini dilakukan untuk meneliti atau memantau secara terus-menerus untuk melihat hasil nyata dari perencanaan yang telah dilakukan untuk proses evaluasi. Sementara evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai pekerjaan, manfaat, dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Salah satu peran BKM adalah melaksanakan fungsi Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan BKM adalah sebagai upaya pertanggungjawaban BKM sebagai pelaksana kegiatan PNPM MP. pengawasan ini dilakukan secara rutin dan periodik oleh BKM yang disusun secara transparan, hasil dari kegiatan ini berbentuk berbentuk laporan yang dapat di lihat oleh masyarakat luas.

2.3 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah sebuah profesi dimana secara profesional seseorang dibidang ini harus membantu menciptakan keberfungsian sosial kliennya yang berasal dari individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Menurut Zastrow, bahwa Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan tujuannya (Suharto, 2009:24). Spergel, Zastrow, dalam Adi (2003:89) menjelaskan bahwa peran pekerja sosial adalah sebagai:

a. Pemercepat perubahan (*enabler*)

Peran *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah mereka; dan

mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif

b. Perantara (*broker*)

Peran broker adalah menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat

c. Pendidik (*educator*)

Peran sebagai pendidik memprasyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan

d. Tenaga ahli (*expert*)

Peran sebagai *expert* memprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area

e. Perencana sosial (*social planner*)

Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis, dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut

f. Advokat (*advocate*)

Peran sebagai advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi instansi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat *negative* ataupun menolak tuntutan warga)

g. Aktifis (*activist*)

Sebagai aktivis menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan

sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*), yang dianggap sebagai korban.

Sementara menurut Zastrow dalam Hariyanto (2011:41) bahwa terdapat 13 peran pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diantaranya:

- a. *Enabler*. Dalam hal ini pekerja sosial membantu individu dan kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah klien dan mengembangkan kapasitas klien untuk memahami masalah.
- b. *Broker*. Menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat tetapi tidak tahu bagaimana dan dimana mendapatkan bantuan tersebut.
- c. *Advocate*. Disini pekerja sosial (peksos) melakukan pembelaan dan keberpihakan terhadap klien atau penyandang masalah kesejahteraan sosial secara aktif dan terarah.
- d. *Empowerer*. Peksos membantu klien mengembangkan kapasitas serta memahami lingkungan untuk membuat pilihan, mengambil tanggung jawab atas pilihan dan pengaruhnya terhadap situasi kehidupan klien.
- e. *Activist*. Peksos melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar yang tujuannya untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan terhadap kelompok yang kurang beruntung, dengan menstimulasi kelompok yang kurang beruntung untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada. Baik melalui konflik, konfrontasi, atau negosiasi.
- f. *Mediator*. Membantu mendamaikan atau mencapai kesepakatan yang saling memuaskan dan menguntungkan.
- g. *Negotiator*. Disini peksos masuk dalam konflik dan berusaha untuk melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama untuk di terima. Berbeda dengan mediator yang lebih menduduki posisi netral.

- h. *Educator*. Peksos berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.
- i. *Inisiator*. Peksos meminta perhatian terhadap masalah atau masalah potensial untuk menyadari bahwa kadang masalah yang potensial membutuhkan potensial.
- j. *Coordinator*. Peksos melibatkan seluruh komponen bersama-sama secara terorganisir untuk menyelesaikan permasalahan klien.
- k. *Reseacher*. Peksos disini dapat menjadi peneliti. Dalam penelitian dapat melibatkan informasi dari membaca literatur, topik-topik penting, melakukan evaluasi dan mempelajari kebudayaan masyarakat.
- l. *Group facilitator*. Peksos berfungsi sebagai pemimpin untuk diskusi kelompok bersama klien.
- m. *Publik speaker*. Peksos kadang harus berbicara dengan kelompok untuk menginformasikan layanan yang tersedia atau untuk mendapatkan layanan baru.

Dalam prakteknya, pekerja sosial bekerja dengan cara atau metode tertentu sebagai profesional yang dikenal dengan metode pekerjaan sosial. adapun cara yang digunakan adalah dengan *social case work*, *social group work* dan CO/CD. Helen dalam Hermawati (2001:33) menjelaskan bahwa *Social Case Work* merupakan upaya menolong individu untuk mencapai tingkat perkembangan kepribadian tertinggi klien (seseorang yang menyandang masalah) agar dapat menolong dirinya sendiri di dalam suatu ikatan tanpa bantuan orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa dalam level *social case work*, pekerja sosial bekerja pada tataran level individu. *Social Group Work* sendiri merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu yang terkait dalam kelompok, agar dapat mencapai tujuan sosial

yang dikehendaki (Hermawati, 2001:47). *Community developmen/CD* atau sering dikenal dengan pengembangan masyarakat menurut Johnson dalam Suharto (2009) Pengembangan masyarakat merupakan spesialisasi atau *setting* praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (*macro practice*). Meskipun pengembangan masyarakat memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, Pengembangan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para pekerja sosial. Pengembangan masyarakat juga sering dilakukan oleh para sukarelawan dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar.

Ada beberapa model pengembangan masyarakat menurut Jack Rothman dalam Suharto (2009:42) yaitu Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), Perencanaan sosial (*social planning*), dan Aksi sosial (*social action*). Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Suharto (2009:42), menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada "tujuan proses" (*process goal*) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa bottom-up ini.

Model-model pengembangan masyarakat perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu memiliki perangkat pengetahuan dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi.

- a. *Engagement* (cara melakukan kontak, kontrak dan pendekatan awal dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).
- b. *Assessment* (cara memahami dan menganalisis masalah dan kebutuhan klien, termasuk assessment kebutuhan dan profil wilayah).
- c. Penelitian (cara mengumpulkan dan mengidentifikasi data sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan dasar dalam merencanakan pemecahan masalah atau mengembangkan kualitas program).
- d. *Group work* (bekerja dengan kelompok-kelompok yang dapat dijadikan sarana pemecahan masalah maupun dengan kelompok-kelompok kepentingan yang bisa menghambat atau mendukung pencapaian tujuan program pemecahan masalah).
- e. Negosiasi (bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik) .
- f. Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga) .
- g. Konseling (melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan).
- h. Manajemen sumber (memobilisasi sumber-sumber yang ada di masyarakat, termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).
- i. Pencatatan dan pelaporan terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

Dalam sumber online (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) Suharto

mengatakan bahwa ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat yaitu:

a. Fasilitator.

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Peran sebagai pemungkin atau fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

b. *Broker*.

Dalam pengertian umum, seorang *broker* membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang *broker* berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang *broker*, klien meyakini bahwa *broker* tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Dalam konteks PM, peran pekerja sosial sebagai *broker* tidak jauh berbeda dengan peran *broker* di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam PM terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan

sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi *broker* mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya merupakan aspek penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal. Ada tiga tugas utama dalam melakukan peranan sebagai *broker*: Pertama, mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat. Kedua, menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten. Ketiga, mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien. Peranan sebagai broker pada prinsipnya adalah “menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai *broker*, yaitu: menghubungkan (*linking*), barang-barang dan jasa (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*).

- *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber, dan meenjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien.
- *Goods* meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
- *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan

untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

c. Mediator.

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Pekerja sosial berperan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator antara lain: mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik, membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, membantu mengidentifikasi kepentingan bersama, melokalisasi konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik, memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

d. Pembela.

Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kelas terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat. Beberapa strategi dalam melakukan peran pembela adalah: keterbukaan (membiarkan berbagai pandangan untuk didengar), perwakilan luas (mewakili semua pelaku yang memiliki

kepentingan dalam pembuatan keputusan), keadilan (kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan, pengurangan permusuhan (mengembangkan keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan, informasi (menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis), pendudukan (mendukung partisipasi secara luas), kepekaan (mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain).

2.4 Partisipasi

Moeliono 2004 (dalam Fahrudin, 2011:36). Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsic*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”. Menurut Adi (2007:27), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan pendapat lain juga dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2012:30) pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Dari beberapa definisi partisipasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat secara ikhlas dan

sukarela, dalam suatu kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengembangan kegiatan. Partisipasi tidak bergitu saja terjadi tetapi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor pendidikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Plumer (2000:25), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian, dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
- b. Pekerjaan masyarakat, biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Lingkup partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan dapat berada pada pada posisi-posisi yang vital seperti pengambilan keputusan dan pemantau. Dalam hal

ini masyarakat dituntut untuk berlaku aktif seperti dalam prinsip PNPM MP. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu unsur penting dalam proses pemberdayaan yang sedang dilakukan, karena dengan partisipasi yang ada akan tercipta kondisi yang mendukung pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mempelajari dan mempraktekannya suatu saat jika sudah terjadi terminasi. Chapin (dalam Slamet, 1994:83) membagi tingkatan partisipasi masyarakat dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut;
- Frekuensi kehadiran (attendance) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan;
- Sumbangan/iuran yang diberikan;
- Keanggotaan dalam kepengurusan;
- Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;
- Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

2.4.1 Tingkatan Partisipasi

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut T. Draha (1990) partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan

merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

2.5 Peran

Berjalannya suatu program dalam sebuah kegiatan dibutuhkan suatu peran dari pelaksana. Peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Sedangkan menurut Achlis (1983: 33), “Peran adalah pola tugas dan tingkah laku yang diharapkan berkaitan dengan status sosial tertentu, yang diekspresikan menurut pengertian dan batasan-batasan tertentu serta berkaitan dengan tingkah laku dan relasi orang lain”.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian serta informasi pendukung dalam sebuah penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Meski mempunyai perbedaan obyek penelitian, lokasi, waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berfikir secara. Tinjauan penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai bahan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. diambil dari hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

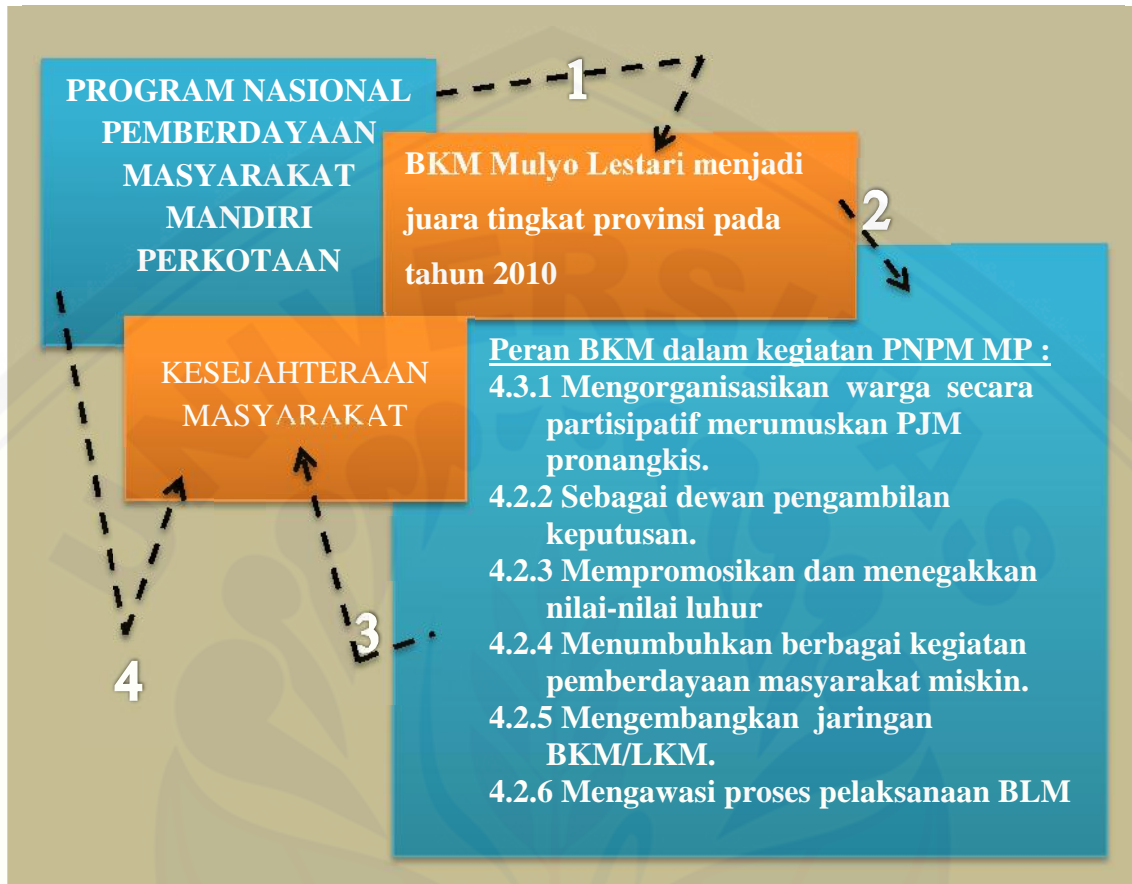
Adalah penelitian Muhammad Zulfadli Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan

Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini menggambarkan peran kepala desa dalam PNPM untuk meningkatkan wilayahnya yang berlokasi di Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini penulis lebih mendeskripsikan peran BKM dalam PNPM MP Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Penelitian kedua adalah Erwin Permana yang dilakukan pada tahun 2010 di daerah Depok Jawa Barat. Penelitian ini keluaran dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul “Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Study Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratujoya Kecamatan Pancoranmas Depok)”. Penelitian ini menggambarkan hasil dari evaluasi program yaitu PNPM MP yang berada di Ratujoya yang mengambil fokus pada evaluasi BKM. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan mendeskripsikan peran BKM.

2.7 Alur Pikir Konsep Penelitian

Road map/alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Road map/alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung”. berikut adalah gambaran alur pikir penelitian yang akan diangkat oleh penulis.

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian



Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2012, Diolah Penulis, 2014

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, menjelaskan bahwa adanya program PNPM MP yang diluncurkan pada tahun 2007 bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan. PNPM MP menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam usahanya menanggulangi kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Di Desa Jatimulyo juga menjalankan program PNPM MP, kegiatan yang telah dijalankan PNPM MP disini seperti Tridaya dan PLPBK. Untuk menjalankan serangkaian program yang ada di PNPM MP Desa Jatimulyo, maka secara organisasi PNPM MP disini dijalankan dan dikelola oleh

BKM Mulyo Lestari yang beranggotakan 13 orang dan semua anggotanya berasal dari masyarakat setempat dengan latarbelakang dan motivasi yang beragam namun memiliki satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Awal pembentukannya sendiri berasal dari siklus masyarakat PNPM MP dan juga dari kebutuhan masyarakat akan lembaga representatif yang ramah dan berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Sejumlah masalah kemiskinan yang menjadi target BKM Mulyo Lestari adalah masalah penataan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni, permodalan usaha dan sosial.

Secara garis besar peran BKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012:81) adalah sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;
2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
5. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

Seperti dijelaskan sebelumnya, secara umum peran dari BKM Mulyo Lestari adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Peran BKM Mulyo Lestari ini berpengaruh pada hasil program PNPM MP yang ada di Desa Jatimulyo.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian dan didasarkan pada pengujian secara ilmiah agar dapat di pertanggung jawabkan keabsahan dari penelitian secara ilmiah. Metode penelitian ini di gunakan untuk mengarahkan penelitian agar berjalan sesuai dengan konteks yang terstruktur dan telah disusun sebelumnya. Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dalam memulai sebuah penelitian yang telah dikonsepsikan. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan fenomena dan permasalahan yang ada, selain itu juga untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Sehingga data tersebut dapat dirumuskan dan dianalisa untuk keperluan analisa. Sesuai dengan judul, tujuan dan masalah penelitian maka tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah metode penelitian memegang peranan yang penting karena pada bab ini mengandung unsur metode pengumpulan data di lokasi penelitian. Berangkat dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang paling tepat digunakan karena dapat menjelaskan, memetakan, mengetahui, mendeskripsikan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2012:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sugiyono (2010:1)

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam melakukan proses pengawasan produksi. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam segi menjalankan perannya di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang mengambil lokasi penelitian di Tulungagung. Dengan demikian pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah kualitatif. Dengan pendekatan ini, hasil analisisnya akan lebih mendalam dan peneliti akan lebih mudah dalam menggali informasi kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian untuk memudahkan mengetahui fenomena yang ada di lapangan karena peneliti dalam melakukan penelitian lebih bersikap natural sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat.

3.2 Jenis Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menurut Moleong (2012:11) merupakan, Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya dimana itu semua

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran penyajian laporan. Jadi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel atau semua gejala maupun keadaan yang ada pada saat penelitian ini dilakukan secara sistematis serta akurat. Penelitian deskriptif lebih menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan dan kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Bungin (2007:30) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, berupaya menarik realitas itu dipermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif karena penelitian ini dimulai dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang diperkuat dengan observasi awal yang telah dilakukan. Observasi awal yang telah peneliti lakukan mendapatkan hasil bahwa masyarakat dilokasi penelitian lebih berdaya dari sebelumnya, program PNPM MP dilokasi ini masih berjalan dan BKM dilokasi ini masih menjalankan fungsinya. Selain itu melihat kembali pada fokus penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena dari Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta memperjelas masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wilayah Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulugagung. Hal ini didasari oleh beberapa alasan yang membuat peneliti memilih lokasi ini seperti: Desa Jatimulyo merupakan salah

satu kelurahan atau desa penerima program PNPM MP, kegiatan PNPM MP di desa tersebut masih berlangsung sampai sekarang, Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa sukses di Tulungagung yang melaksanakan program PNPM MP, seperti data yang peneliti dapat dari Korkot PNPM MP Tulungagung. Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa penerima Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau PLBPK dikecamatan Kauman, penerima PLBPK sendiri diseluruh Jawa Timur ada 35 desa. Desa penerima PLBPK adalah desa yang dianggap mandiri dan merupakan *reward* dari PNPM MP. Selain itu pada tahun 2010 Desa Jatimulyo pernah mendapat penghargaan sebagai juara dua tingkat provinsi dari badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Provinsi Jawa Timur dalam lomba pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Dengan melihat fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan bagian dari data yang sangat penting dalam suatu penelitian. Memperoleh data yang lengkap dalam penelitian tidak membatasi jumlah informan karena disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan. Informan adalah orang-orang kunci yang dijadikan subyek penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informan juga merupakan orang-orang yang mampu memberikan masukan kepada peneliti tentang masalah yang diangkat.

Penentuan karakteristik informan dalam penelitian ini di ambil secara purposive sampling. Teknik purposive menurut Sugiyono (2010:53) teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti Dengan teknik purposive peneliti akan lebih mudah menentukan

informan. Informan pada penelitian ini hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan.

Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* karena dalam BKM Mulyo Lestari sudah terdapat data mengenai siapa-siapa anggota BKM tersebut, sehingga peneliti sudah memperoleh kejelasan mengenai orang-orang yang dapat dijadikan informan, hanya saja nantinya peneliti perlu membuat suatu kriteria tertentu untuk memastikan seseorang benar-benar mengerti permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga layak untuk dijadikan informan dan dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). Adapun kriterianya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian

No	Informan Pokok	No	Informan Tambahan
1	Aktif di kegiatan BKM dan PNPMP	1	Sering bekerjasama dengan BKM
2	Anggota/pernah menjadi BKM.	2	Bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk wawancara
3	Bersedia dan memiliki waktu yang cukup wawancara		

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2014

3.4.1 Informan Pokok

Penentuan informan pokok berfungsi untuk mendapatkan data utama dan informasi terkait. Untuk itu dibutuhkan data yang jelas dan berkaitan dengan anggota BKM di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pada karakteristik yang telah ditentukan untuk informan pokok maka profil informan pokok sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Pokok

No.	Informan	Status
1	AM	Anggota BKM periode 2014
2	AS	Anggota BKM periode 2009
3	AP	Anggota BKM periode 2014
4	MN	Pengawas UPK

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2014

Berikut profil informan pokok secara umum:

a. Informan AM.

Nama : AM
 Alamat : Jatimulyo
 Umur : 65 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : Sarjana
 Posisi di BKM Mulyo Lestari : BKM 2014
 No Telepon : -

AM dipilih sebagai informan pokok karena M merupakan anggota BKM dan merupakan PK BKM. Keterlibatan AM dalam PNPM MP bukan hanya pada periode BKM 2014 saja, lebih dari itu laki-laki yang lahir 65 tahun lalu merupakan generasi pertama BKM di Jatimulyo sejak P2KP. AM terpilih menjadi ketua BKM pada periode tahun 2014 untuk menggantikan AS yang telah habis masa jabatannya.

b. Informan AS.

Nama : AS
Alamat : Jatimulyo
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Posisi Di BKM Mulyo Lestari : -
No Telepon : 085856031xxx

AS adalah bagian dari anggota BKM generasi pertama. Saat P2KP telah menjadi PNPM MP AS masih aktif dan kembali menjadi anggota PK BKM periode 2009, meskipun sudah tidak menjabat sebagai anggota BKM informan AS masih cukup aktif dalam kegiatan PNPM MP. Selama bergabung dengan PNPM MP AS bergabung dengan tim lingkungan.

c. Informan AP.

Nama : AP
Alamat : Jatimulyo
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Posisi Di BKM Mulyo Lestari : BKM 2014
No Telepon : 081335351xxx

AP adalah salah satu anggota perempuan dalam BKM mulyo Lestari. Saat ini AP aktif di BKM periode 2014 dan aktif di pelaksanaan PLPBK bidang jambanisasi bersama NS.

d. Informan MN.

Nama : MN
 Alamat : Jatimulyo
 Umur : 75 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan terakhir : SMK
 Posisi di BKM Mulyo Lestari : -
 No Telepon : -

MN adalah salah satu pengawas UPK (Unit Pengelola Keuangan) di PNPM MP Desa Jatimulyo. Pada awal kegiatan P2KP MN pernah duduk sebagai anggota BKM. Dan saat P2KP berubah menjadi PNPM MP, MN terpilih menjadi pengawas UPK.

3.4.2 Informan Tambahan

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172), informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah orang YANG PALING sering berhubungan dan dianggap mengetahui tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh informan pokok. Informan tambahan dapat digunakan untuk mengecek ulang kebenaran atau keabsahan data yang telah diperoleh dari informan pokok. Untuk kriteria informan tambahan lihat pada tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian.

Tabel 3.3 Informan Tambahan

No.	Informan	Status
1	SG	Kepala desa
2	T	Fasilitator
3	AN	Fasilitator
4	NS	Anggota KSM

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2014

Berikut adalah profil informan tambahan secara umum:

a. Informan SG

Nama : SG
Umur : 45 tahun
Alamat : Jatimulyo
Posisi : Kepala Desa
No telepon : -

Informan SG adalah kepala Desa Jatimulyo. Pemdes atau pemerintah desa adalah salah satu mitra kerja PNPM MP dan sering bekerjasama dengan BKM Mulyo Lestari.

b. Informan T

Nama : T
Umur : 30 tahun
Alamat : Perum. Puri Permata, Tulungagung
Posisi : Fasilitator Teknik
No telepon : 08125297xxx

Informan T adalah fasilitator lingkungan di PNPM MP Desa Jatimulyo. Sebagai fasilitator teknik, informan T cukup sering berhubungan dan bekerjasama dengan BKM Mulyo Lestari.

c. Informan AN.

Nama : AN
Umur : 30
Alamat : Kalangbret
Posisi : Fasilitator
No telepon : 081335704xxx

Informan AN adalah fasilitator ekonomi, informan AN telah mendampingi Desa Jatimulyo sejak P2KP hingga sekarang.

d. Informan NS.

Nama : NS
Umur : 49 tahun
Alamat : Jatimulyo
Posisi : KSM
No telepon : 083831595xxx

Informan NS adalah salah satu anggota KSM yang aktif di kegiatan PLPBK. Sejak masih P2KP, NS sudah terlihat aktif namun pada tahun 2011 NS mengundurkan diri dan kembali bergabung dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan masalah yang paling penting dalam penelitian karena akan banyak mempengaruhi data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dan menghindari akan kualitas data yang buruk sedangkan data tersebut dijadikan sebagai pengidentifikasian fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dibedakan menjadi dua yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti berdasarkan sumber data utama. Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen atau laporan dan data ini dikumpulkan oleh sumber-sumber terkait dengan masalah atau judul penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dibedakan menjadi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkumpul dari sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen atau laporan-laporan yang dikumpulkan oleh pihak terkait dengan kegiatan PNPM MP.

3.5.1 Observasi

Menurut Irawan (2006:71) observasi juga tidak mudah digunakan. teknik ini memerlukan sensitifitas dan juga kejelian yang sangat tinggi dari peneliti. Objek yang dievaluasi bisa bersifat nyata (*tangible*) seperti benda-benda, gerakan, perilaku. Akan tetapi objek juga bersifat (*intangible*) seperti suasana atau situasi . anda bisa merekam suara-suara mendesis seperti angin (*tangible*) atau anda melaporkan hasil pengamatan berupa suasana sunyi senyap yang mencekam (*intangible*). Sementara menurut Faisal dalam Sugiyono (2010:64) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

a. Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak.

b. Observasi Terus Terang Atau Tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

c. Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan dan perkembangan mengenai peran BKM. Peneliti memilih menggunakan observasi

partisipasi pasif (*passive participation*), saat melakukan kegiatan ini peneliti hanya mengamati apa yang dilakukan informan dan melakukan komunikasi dengan informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan Agustus tahun 2013. Untuk melengkapi dan menguji kebenaran data peneliti melakukan kegiatan lain seperti mengunjungi rumah informan, mengunjungi dan menemani informan melakukan aktivitasnya, melihat lokasi program baru.

3.5.2 Pengumpulan Data dengan Wawancara

Sebuah wawancara diharapkan suatu hubungan secara langsung antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai. Dalam wawancara diperlukan bahasa yang mudah dimengerti dan kesepahaman antara pewawancara dengan informan. Esterberg dalam Sugiyono (2010:72), mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Ada berbagai teknik wawancara yang bisa dipergunakan oleh peneliti. Stainback dalam Sugiyono (2010:72), mengemukakan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Macam-macam wawancara :

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informan apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.

b. Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, wawancaranya bersifat fleksibel dapat menggunakan percakapan sehari-hari agar tercipta keakraban. Sebelum melakukan wawancara peneliti menghubungi informan untuk mengatur jadwal bertemu. Selanjutnya waktu wawancara yang digunakan peneliti terjadwal seperti pagi hari jam 09.00 WIB, siang hari jam 14.00 WIB, sore hari jam 16.00 WIB dan malam hari jam 19.00 WIB. Sehari sebelum wawancara dilakukan peneliti menghubungi informan lagi untuk mengingatkan jadwal wawancara dan memberitahu gambaran umum topik yang akan dibicarakan bersama dan gambaran umum pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan. Diawal wawancara, peneliti mengawali dengan pembicaraan seputar kegiatan informan sehari-hari yang selanjutnya dilanjutkan pada topik wawancara sehingga nantinya tujuan dari penelitian ini akan didapatkan. Wawancara diakhiri dengan mengucapkan terima kasih, dan memberitahu jika dilain waktu peneliti kemungkinan menghubunginya dengan telepon atau menemuinya lagi secara langsung jika ada data maupun informasi yang didapat kurang lengkap atau kurang jelas.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara menelaah berbagai literature, dokumen-dokumen resmi, mencatat dan sebagainya. Data dokumentasi dikumpulkan dari tempat penelitian dan tempat atau lembaga lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Berbagai sumber data dalam PNPM MP Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dapat dijadikan rujukan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya juga akan dilakukan telaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bisa membantu melihat fenomena pada saat observasi atau wawancara. Sugiono (2010:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen disini digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data nonmanusia merupakan suatu yang sudah tersedia, dan peneliti tinggal memanfaatkannya. Sumber informasi yang berupa dokumen dan catatan/ rekaman sesungguhnya cukup bermanfaat, ia telah bersedia sehingga akan relative murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya. Ia dapat dianalisis berulang-ulang dengan dengan tidak mengalami perubahan. Untuk informasi konteks, ia dapat merupakan sumber yang cukup kaya. Ia merupakan data yang secara legal dapat diterima dan tak dapat memberikan reaksi apapun terhadap peneliti sebagaimana halnya sumber data yang berupa manusia.

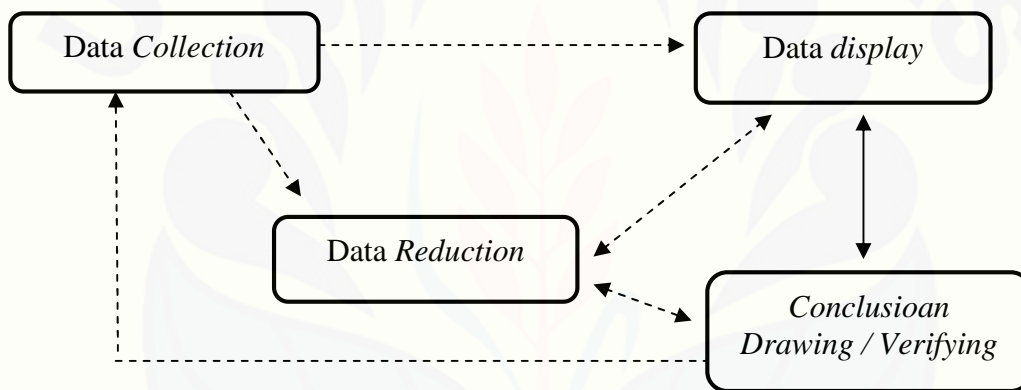
Data dokumentasi yang di dapat peneliti digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi peneliti dapatkan dari dokumentasi milik BKM Mulyo Lestari, dokumentasi Fasilitator dan Korkot, serta dokumentasi pribadi anggota BKM.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiono (2010:88) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Analisis data merupakan suatu langkah yang penting dalam suatu penelitian. Tahap analisis data merupakan tahap pemecahan suatu masalah.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:91) tahapan dalam analisis data ialah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: Sugiyono, 2010

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan semua data apa adanya sesuai dengan hasil pada tahap observasi dan wawancara lapangan yang telah dilakukan.

2. Reduksi data

Data yang telah didapatkan dari lapangan selanjutnya di catat secara rinci dan diteliti. Lamanya peneliti dilapangan maka data yang didapatpun semakin banyak dan kompleks untuk itu maka dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan merangkum dan memilah data, memfokuskannya data dengan mengambil hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya.

Selanjutnya setelah data ada ditangan peneliti, maka membagi data menjadi data sekunder dan data primer. Sebagai gambarannya, untuk data sekunder

yang didapatkan dikumpulkan menjadi satu seperti data yang didapatkan dari desa berupa profil desa, data yang didapatkan dari BPS, laporan kegiatan dan foto-foto BKM dari BKM Mulyo Lestari, formulir dan buku pedoman pelaksanaan PNPM MP dari Korkot dan Fasilitator PNPM MP, foto-foto pribadi kegiatan dari anggota BKM serta foto dan catatan kecil yang sengaja peneliti buat saat disana. Sedangkan data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Penyajian data

Tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk teks yang dinarasikan, karena penelitian ini adalah kualitatif. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan/menyajikan data. Dalam penyajian data penelitian. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi dan untuk merencanakan tahap selanjutnya. Sebagai gambarannya setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti mulai mereduksinya menjadi bagian-bagian yang penting dan lebih fokus pada judul yang diteliti. Setelah data ini menjadi lebih fokus baru peneliti menyajikan data-data ini dalam bentuk tulisan atau narasi.

4. Pengambilan keputusan

Dalam tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulannya masih bersifat sementara karena hanya awal dan dapat berubah jika diperlukan. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini dilengkapi bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Selama penelitian mungkin timbul kesalahan. Bisa berasal dari peneliti atau dari informan. Maka untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses menjadi laporan, dengan harapan laporan yang disajikan tidak mengalami kesalahan. Kesahian dan kevalidan data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian. Tanpa data yang valid dan dapat diuji kebenarannya, maka penelitian tidak dapat dikatakan ilmiah. Data yang valid merupakan data yang benar-benar diperoleh dari sumber yang kompeten terhadap masalah yang akan diteliti. Penguji kevalidan

data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi. Menurut Sugiono (2010:119) dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Standar kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Sugiyono (2010:127) terdapat tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil ini menghasilkan data yang 56 berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti melakukan cek data ke informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang di dapat dari wawancara di cek dengan observasi, dokumentasi yang dimiliki oleh lembaga terkait dan dokumentasi yang dari peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah data jenuh, menurut Idrus (2009) data jenuh memiliki makna kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi data) dan pada siapapun pertanyaan diajukan (triangulasi subjek) memiliki jawaban yang sama. Sehingga pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Dalam bab 4 ini dikemukakan tentang analisis data dan pembahasan temuan penelitian. Seperti telah dikemukakan di bab 3, data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa jatimulyo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Desa Jatimulyo berdiri di atas tanah seluas 1.48km dengan jumlah 37 Rukun tetangga dan 7 Rukun Warga, desa ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

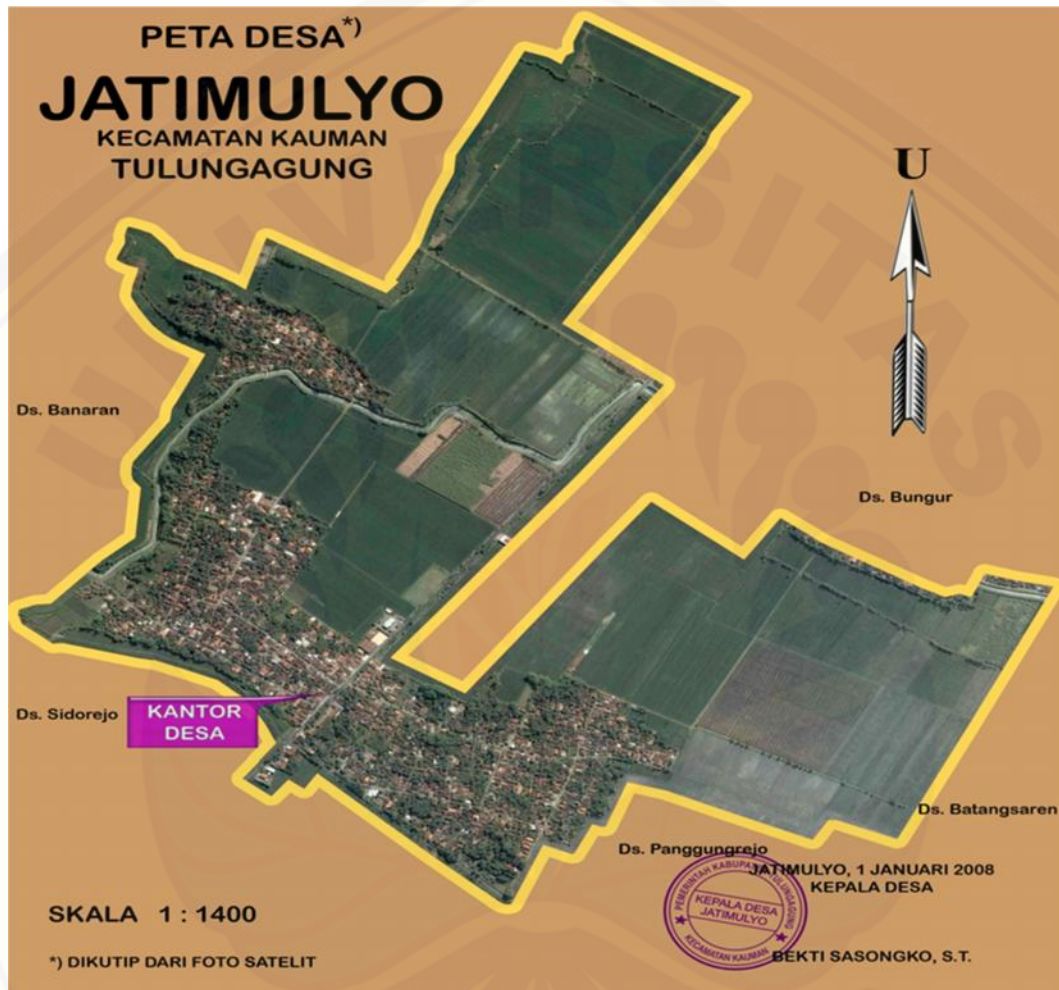
Sebelah utara	: Desa Bungur
Sebelah barat	: Desa Banaran
Sebelah selatan	: Desa Sidorejo
Sebelah timur	: Desa Batangsaren

Wilayah Desa Jatimulyo termasuk strategis karena letaknya yang berada di percaturan transportasi yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Kauman dan Karangrejo. Selain itu untuk mencapai ibu Kota Kecamatan tidak terlalu lama hanya sekitar sepuluh menit sehingga dapat membuka akses ekonomi. Jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 5 km. Sedangkan waktu tempuh ke fasilitas terdekat seperti kesehatan, pemerintahan dan ekonomi kurang lebih dapat di capai dalam waktu lima menit. Secara administratif Desa Jatimulyo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Patek Reco, Dusun Jabon dan Dusun Baran.

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di desa ini cukup bervariasi. Wilayahnya yang subur dan dekat dengan pabrik gula dimanfaatkan warganya untuk bertani dan

menanam tanaman tebu. Karena hal ini juga banyak warganya yang berprofesi sebagai petani dan buruh pabrik.

Gambar 4.1 Peta Desa Jatimulyo



Sumber: Diolah dari data dokumentasi, 2014

4.1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jatimulyo pada tahun 2013 tercatat sebanyak 4200 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2014 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2186 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Desa Jatimulyo sebanyak 2368 jiwa. Untuk lebih mudahnya komposisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Jatimulyo Tahun 2013

Uraian	Jumlah penduduk	Prosentase (%)
Laki-Laki	2014	48
Perempuan	2186	52
Total	4200	100

Sumber : laporan data jumlah penduduk Desa Jatimulyo tahun 2013

Sedangkan jumlah kepala keluarga atau KK di Desa Jatimulyo adalah sebanyak 1766 kepala keluarga. Jumlah KK laki-laki sebanyak 1567 sedangkan KK perempuan sebanyak 199 sedangkan jumlah KK miskin sebanyak 832. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2013

Uraian	Kepala Keluarga (KK)	Prosentase (%)
Laki-laki	1567	89
Perempuan	199	11
Total	1766	100

Sumber : laporan data jumlah penduduk Desa Jatimulyo tahun 2013

Jumlah KK miskin di desa ini sebesar 832 atau kurang lebih 47%, hal ini juga yang menjadikan Desa Jatimulyo menerima program PNPM MP. Melihat pada fakta ini maka dapat dikatakan bahwa mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan, pendidikan, penghasilan serta kesehatannya yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya sehingga diperlukan sejumlah intervensi untuk menanganinya.

4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk menurut umur di bawah ini berdasarkan pada klasifikasi penduduk dengan usia belum produktif dan usia tidak produktif. Klasifikasi ini dapat menggambarkan kemiskinan dengan membandingkan jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia belum dan tidak produktif yang ada di Desa Jatimulyo tahun 2013. Desa Jatimulyo memiliki penduduk dengan jumlah tertinggi

pada usia 65 tahun keatas sebanyak 373 jiwa yang merupakan penduduk kurang produktif. Sedangkan penduduk yang paling kecil adalah penduduk pada usia 60 – 64 tahun sebanyak 148 jiwa. Penduduk usia produktif 15 – 64 tahun sebanyak 2794 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk usia produktif di Desa Jatimulyo lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu sebanyak 1406 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2013

Klasifikasi Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	160	174	334 orang
5 – 9	168	182	350 orang
10 – 14	167	182	349 orang
15 – 19	146	158	304 orang
20 – 24	129	140	269 orang
25 – 29	157	170	327 orang
30 – 34	154	167	321 orang
35 – 39	159	173	332 orang
40 – 44	161	174	335 orang
45 – 49	144	157	301 orang
50 – 54	120	130	250 orang
55 – 59	99	108	207 orang
60 – 64	71	77	148 orang
65+	179	194	373 orang

Sumber : Kecamatan dalam angka Kauman *regency in figures* 2013

4.1.3 Pendidikan

Kualitas pendidikan menggambarkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu daerah. Berikut adalah tabel kualitas pendidikan yang dimiliki Desa Jatimulyo pada tahun 2013:

Tabel 4.4 Kualitas Pendidikan Tahun 2013

Kualitas Pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	305 orang
Belum tamat SD/ sederajat	977 orang
SD/ sederajat	1623 orang
SLTP/ sederajat	703 orang
SLTA/ sederajat	432 orang
Perguruan tinggi	159 orang

Sumber : Kecamatan dalam angka Kauman *regency in figures* 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk Desa Jatimulyo masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan dan lulusan SD menduduki tempat tertinggi dengan jumlah 1623 orang. Hal ini kemudian juga terlihat pada jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi masih sedikit yang ditunjukkan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi hanya terdapat 159 orang. Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan di Desa Jatimulyo masih rendah.

4.1.4 Pekerjaan dan Mata Pencaharian Utama Penduduk

Mata pencaharian penduduk menggambarkan tingkat perekonomian Desa Jatimulyo secara keseluruhan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Tahun 2013

Sektor	Jumlah
Pertanian	329 orang
Jasa	63orang
Pedagang	158 orang
Swasta	163orang
Buruh	178orang
PNS/TNI/polri	22orang
Wiraswasta	88orang
Konveksi	62orang

Sumber : Kecamatan dalam angka Kauman *regency in figures 2013*

Berdasarkan tabel diatas, mata pencaharian di sektor pertanian mendominasi mata pencaharian penduduk di desa ini. Sektor pertanian mendominasi dari seluruh kategori yang ada karena Desa Jatimulyo menyediakan lahan yang cukup dan cocok untuk pertanian. Mata pencaharian sebagai buruh menduduki peringkat kedua yaitu sebanyak 178 orang. Selanjutnya disusul oleh swasta, pedagang, wiraswasta, konveksi, jasa dan PNS pada urutan terakhir.

4.1.5 Kondisi Lingkungan

Karakteristik fisik Desa Jatimulyo sekarang jauh lebih baik jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya seperti awal tahun 2003. Kondisi jalan di Desa Jatimulyo lebih banyak didominasi oleh jalan dengan bahan paving yang mudah dijumpai hampir di semua dusun yang ada di Jatimulyo seperti dusun Patik Reco, Jabon hingga Baran. Hingga saat ini perbaikan dan realisasi perbaikan jalan baik jalan utama maupun jalan di gang-gang besar maupun kecil masih berlanjut di Desa Jatimulyo. Penduduk Desa Jatimulyo sebagian besar masih belum memiliki sarana MCK yang sehat meskipun program WC-nisasi sudah masuk dalam program PNPM MP, terutama di wilayah Jatimulyo timur yaitu Dusun Patik Reco. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan sungai untuk melampiaskan hajatnya.

4.2 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mulyo Lestari

Terkait dengan pelaksanaan program PNPM MP, Posisi BKM Mulyo Lestari dalam PNPM MP adalah sebagai lembaga representasi masyarakat yang berbentuk dewan pimpinan kolektif yang bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan diwilayahnya. Selain itu BKM ini juga bertugas sebagai koordinator pengelolaan program yang ada di masyarakat serta unit-unit kerja yang dibentuknya seperti UPK, UPL dan UPS. Secara struktur organisasi, BKM Mulyo Lestari difasilitasi oleh tim fasilitator dan tim ini kemudian berkoordinasi dengan PJOK Kecamatan yang melaporkan ke camat, selain itu tim fasilitator ini melaporkan ke koordinator kota (Korkot) Tulungagung yang merupakan KMW yang juga memiliki tim koordinator sendiri (lihat gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan).

Keberadaan BKM Mulyo Lestari dalam program PNPM MP cukup membantu kesuksesan pelaksanaan program-program PNPM MP diwilayah ini, begitupun dengan keberfungsian BKM Mulyo Lestari masih cukup baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan H selaku korkot Tulungagung dalam komentarnya soal BKM Mulyo Lestari dibawah ini:

“Responnya bermacam-macam, sejauh ini positif. Artinya mereka (anggota BKM) mau bekerjasama.” (H: Januari 2014).

Dari apa yang diungkapkan oleh informan H selaku korkot Tulungagung, menggambarkan bahwa BKM Mulyo Lestari mampu menjalankan perannya. Meskipun dalam pelaksanaannya cukup baik, dalam kenyataannya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh BKM Mulyo Lestari dalam melaksanakan program PNPM MP, salah satunya seperti yang dikatakan oleh infroman H berikut ini:

“Yah buanyak kendala-kendala yah sekarang salah satunya yang sekarang yah itu adalah yang *jenengan* (anda) sampaikan tadi adalah semangat mereka sudah mulai menurun karena apakah *saking* (terlalu) lamanya kita dampingi sehingga mereka jadi *ngebotne* (mengandalkan) tahu ga istilah *negbotne* (mengandalkan) *istilaha wes pokoke* (istilahnya) ada pendamping itu sehingga ee harapan proyek itu kitakan mandiri ee bagaimana masyarakat ini bisa menjadi mandiri ketika sudah lepas dari kita itu tapi karena *saking* (terlalu) lamanya begitu *saking* (terlalu) lamanya dia terlibat ee mereka sendiri kan juga punya kehidupan mencari mak isah begitukan mak isah itu mencari ee *pangupon jiwo* (mematangkan bathin) kalo orang jawa kalau bahasa ininya kan mak isah *pangupon jiwo* (mematangkan bathin) kalau bahasa Indonesianya kita mencari rejeki itulah dan kewajiban untuk keluarganya itu”.
(H: Januari 2014)

Berdasarkan pada keterangan informan diatas, menggambarkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh BKM Mulyo Lestari dalam melaksanakan program PNPM MP adalah kendornya atau menurunnya semangat mereka dalam melaksanakan program yang telah disusun. Hal ini ditengarai oleh beberapa faktor seperti lamanya pendampingan yang dilakukan dan juga kesibukan lain anggota BKM Mulyo Lestari.

4.2.1 Profile BKM Mulyo Lestari

Sejarah terbentuknya BKM Mulyo Lestari terdorong dari kebutuhan siklus PNPM MP yang mewajibkan adanya suatu wadah atau kelembagaan lokal yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tujuan dari dibentuknya lembaga lokal ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. anggota BKM Mulyo Lestari dipilih untuk masa bakti 3 tahun dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan *reshuffle* jika diperlukan atau pilihan ulang. Jumlah anggota BKM Mulyo Lestari ini maksimal adalah 15 dan minimal adalah 7 orang yang di tetapkan dalam rembug warga dan sifat keanggotaannya adalah kerelawanan, untuk BKM Mulyo

Lestari saat ini anggotanya berjumlah 13 orang, jumlahnya harus ganjil agar mudah mencapai quorum dalam mengambil keputusan serta minimum harus melibatkan 30% dari unsur perempuan sebagai anggotanya. Saat ini BKM Mulyo Lestari memiliki 5 orang anggota perempuan dan memiliki 8 orang anggota laki-laki. Adapun jumlah data anggota PK BKM Mulyo Lestari untuk masa bakti tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

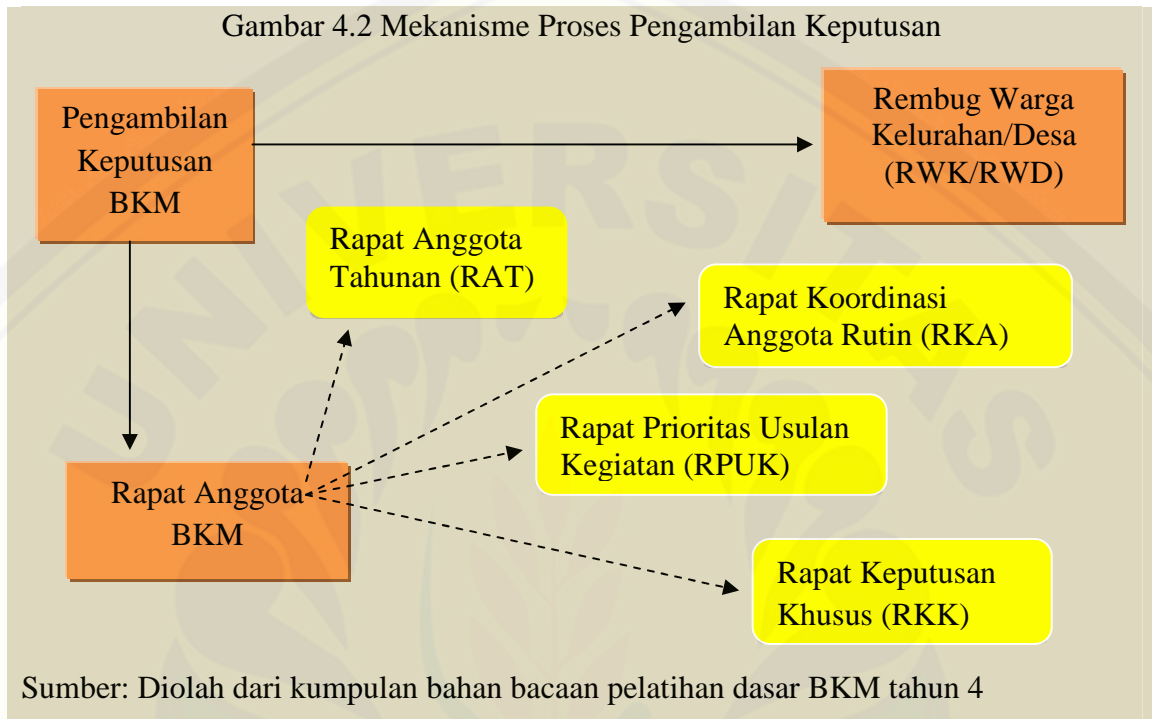
Tabel 4.6 Data Anggota BKM Mulyo Lestari Masa Bakti Tahun 2013

No.	Nama	Jenis kelamin
1	Drs. Mustamad	Laki-laki
2	Drs. H. Supardi	Laki-laki
3	Aniek Indrayati, S.Pd	Perempuan
4	Sudomo	Laki-laki
5	Yoni Triwiharto	Laki-laki
6	Poningah	Perempuan
7	Siti Asiyah	Perempuan
8	Endah Tri Yuli Setyowati	Perempuan
9	Kandung Sugiarto	Laki-laki
10	Sukardi	Laki-laki
11	Agus Wahyudi	Laki-laki
12	Agus Hariyanto, S.Pd	Laki-laki
13	Rista Febri Widiarlika, S.Pd	Perempuan

Sumber: Diolah dari laporan pelaksanaan kegiatan BKM Mulyo Lestari tahun 2013

Dari tabel 4.5 Data Anggota BKM Mulyo Lestari Masa Bakti Tahun 2013 tersebut memperlihatkan bahwa BKM Mulyo Lestari mayoritas anggotanya adalah laki-laki, namun demikian juga telah melibatkan partisipasi perempuan dalam lembaganya, selain itu jumlah anggotanya yang ganjil sudah sesuai dengan yang di sarankan oleh PNPM MP.

Dalam mengambil keputusan BKM Mulyo Lestari tidak serta merta melakukannya tetapi melalui beberapa mekanisme yang harus dilakukan seperti pada gambar 4.3 dibawah ini:



Adapun proses dari mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah sebagai berikut ini:

1. Rembuk Warga Kelurahan/Desa (RWK)

Kegiatan ini dilakukan pada tataran kelurahan/desa. Untuk mekanismesnya sendiri sudah diatur di AD BKM dan keputusan hasil RWK ini bersifat mengikat. Peserta RWK adalah seluruh lapisan masyarakat Desa Jatimulyo yang telah dewasa dan juga melibatkan perangkat desa setempat. RWK ini adalah bagian dari mekanisme pertanggung jawaban BKM serta merupakan tanggung gugat BKM pada seluruh pihak terutama masyarakat. Selain itu RWK juga dapat digunakan sebagai forum untuk pergantian anggota BKM yang habis masa jabatannya dan mekanisme apabila di curigai adanya penyimpangan.

2. Rapat anggota BKM

Rapat anggota BKM adalah rapat yang dilakukan oleh BKM untuk membuat keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh BKM terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di lokasinya. Rapat ini biasanya dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari di balai desa dan harus dihadiri oleh semua anggota BKM. Dalam rapat anggota BKM ini di bagi menjadi 4 kategori yaitu:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT):

Merupakan rapat yang diselenggarakan setiap tahunan. Rapat ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja UP. Rapat anggota tahunan ini bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat dan mekanismenya sudah di atur ke dalam AD/ART BKM Mulyo Lestari.

b. Rapat Koordinasi Anggota Rutin (RKA):

Rapat ini adalah rapat yang harus dilakukan oleh BKM minimal satu kali sebulan. Dalam RAK ini biasanya membahas tentang perkembangan program-program dan juga kemajuan kegiatan yang telah dilakukan BKM Mulyo Lestari. RAK ini juga digunakan sebagai forum anggota BKM untuk membahas dan menetapkan rencana kegiatan BKM dan UP, Selain itu juga untuk menetapkan rangking atau prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang telah di nilai sebelumnya.

c. Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK):

Seperti namanya, rapat ini adalah rapat yang digunakan oleh BKM Mulyo Lestari untuk menetapkan rangking atau prioritas usulan-usulan dari kegiatan yang telah dinilai sebelumnya.

d. Rapat Keputusan Khusus (RKK):

BKM dapat melakukan RKK ini kapanpun sesuai dengan kebutuhannya, RKK dilakukan untuk mengambil sikap atau keputusan BKM yang berkaitan dengan kegiatan BKM Mulyo Lestari dan penanggulangan kemiskinan saja.

4.2.2 Visi dan Misi BKM Mulyo Lestari

BKM bekerja dengan berlandaskan visi dan misi yang di buat secara musyawarah dengan kesepakatan bersama. Adapun visi dan misi BKM Mulyo Lestari adalah sebagai berikut:

1. Visi BKM Mulyo Lestari

Menyelenggarakan penanggulangan kesmiskinan secara mandiri dalam pembangunan masyarakat, perumahan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan serta terwujudnya nilai-nilai luhur berbangsa yang berakar di masyarakat sebagai realisasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat perkotaan.

2. Misi BKM Mulyo Lestari

- a. Mengupayakan agar keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) karena alasan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, serta memperoleh manfaat dari padanya. Memberdayakan penduduk, keluarga dan masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha kecil dan pemberdayaan lingkungan.
- b. Menanggulangi dan mencegah terjadinya proses kemiskinan yang semakin parah akibat situasi krisis yang berkepanjangan, musibah dan bencana khususnya dalam hal kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja.
- c. Pengadaan pelatihan keterampilan bagi kaum wanita serta memberi kesempatan untuk ikut dalam organisasi kemasyarakatan.
- d. Membangun kemitraan.

4.2.3 Struktur Keorganisasian BKM Mulyo Lestari

Lestari memiliki struktur organisasi yang jelas, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan dan membuat kerja BKM lebih efektif, adapun struktur organisasi

BKM Mulyo Lestari terlampir pada Lampiran 8. Berdiri pertama kali pada tahun 2008 lalu di Jatimulyo melalui siklus PNPM MP dan di sahkan melalui akta notaris dengan Nomor 201/PYW/XI/2010. BKM ini memiliki visi yaitu “Menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dalam pembangunan masyarakat, perumahan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan serta terwujudnya nilai-nilai luhur berbangsa yang berakar di masyarakat sebagai realisasi kemitraan antara pemerintah dan masyarakat perkotaan”.

Struktur bagan keorganisasian BKM Mulyo Lestari terlampir. Uraian terkait tugas dan fungsi berdasar pada struktur keorganisasian BKM Mulyo Lestari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Fungsi Berdasarkan Pada Struktur Keorganisasian BKM Mulyo Lestari

No	Jabatan	Fungsi
1	PK BKM	Menjadi motor penggerak gerakan kolektif (bersama) masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
2	Badan pengawas UPK	Secara khusus membantu UPK untuk menyelenggarakan kegiatan pinjaman bergulir
3	Sekretariat	Untuk mengadministrasi kegiatan sehari-hari BKM.
4	UP	Unit Pelaksana (UP) adalah satuan pelaksana yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan BKM/LKM dalam mengelola kegiatan pembangunan. Secara umum dibagi menjadi UPK (Unit Pengelola Keuangan), UPL (Unit Pengelola Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial).
7	KSM	Mitra BKM dan UP

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2014.

BKM Mulyo Lestari menerima alokasi dana BLM yang pertama sebesar Rp.250.000.000, sampai saat ini dana BLM PNPM MP yang telah dialokasikan dan telah didistribusikan oleh BKM Mulyo Lestari sebesar Rp. 1.075.000.000, sejak awal pembentukannya BKM Mulyo Lestari berkomitmen dan fokus pada penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan Tridaya yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk kegiatan ekonominya, BKM Mulyo Lestari mengupayakan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemberian modal usaha berupa uang melalui pinjaman yang mudah dan ringan kepada masyarakat yang tergabung dalam KSM, kegiatan ini diberinama ekonomi bergulir. Besaran berupa pinjaman bergulir untuk KSM pada awal berdirinya maksimal yang bisa diberikan adalah sebesar Rp.500.000 per-KSM, namun pada tahun 2013 BKM Mulyo Lestari mampu memberikan pinjaman pada KSM sebesar Rp.1000.000. Untuk kegiatan sosialnya melakukan kegiatan berupa penggemukan kambing, unggas bergulir, realisasi bantuan sarana produksi sari kedelai dan ternak telur puyuh, peningkatan kesehatan balita-lansia dengan menjalin kerjasama dengan posyandu kelurahan dan pendidikan dengan pengadaan bantuan beasiswa untuk siswa tidak mampu. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan dengan melakukan penataan lingkungan baik sanitasi, perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni.

4.3 Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

Pelaksanaan PNPM MP tanpa BKM bisa dipastikan kegiatan tersebut tidak berjalan mulus, keberadaan BKM memang diwajibkan dalam siklus PNPM MP lebih dari itu BKM adalah wadah organisasi masyarakat dimana semua kegiatan PNPM MP dimulai disini. Misalnya saja untuk menentukan program-program pemberdayaan yang akan direalisasikan terlebih dulu harus diadakan rembug atau rapat yang difasilitasi oleh BKM. Dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012:81) disebutkan beberapa peran BKM sebagai berikut :

- a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;
- b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
- c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
- d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
- e. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
- f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

Adapun peran yang dilakukan oleh anggota BKM Mulyo Lestari adalah sebagai berikut :

4.3.1 Mengorganisasikan Masyarakat Secara Partisipatif: Pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif.

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan akan didapatkan hasil berupa kegiatan/program yang akan dikerjakan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, prosedur serta alternatif kebijakan. Perencanaan dalam kegiatan PNPM MP Desa Jatimulyo dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari bersama-sama dengan masyarakat dan juga pemdes. Hanif,dkk (2009:11) mengatakan bahwa pelibatan masyarakat (*stakeholder*) tersebut sangat penting karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistim ekonomi daerah adalah masyarakat. Lebih lanjut Hanif,dkk (2009:11) menjelaskan bahwa model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Skema perencanaan partisipatif yang telah dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dilakukan dari bawah dengan sistim *button-up planning*. Sistim *button-up planning* adalah sistim perencanaan yang dilakukan dari bawah seperti perencanaan yang dilakukan ditataran masyarakat sehingga masyarakat akan menemukan dan mengenali (identifikasi) kebutuhannya, masalahnya serta solusinya. Hasil yang dirahapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat berperan (partisipasi) dalam memberikan masukan/gagasan awal hingga pelaksanaan dan kegiatan evaluasi kegiatan, pemerintah hanyalah berperan memfasilitasinya saja. Seperti yang dijelaskan oleh informan AN dibawah ini:

“Untuk perencanaan ini dari bawah itu tadi mbak. Jadi mulai dari RK PS nah itu yang menentukan masyarakat. *Nggih* (iya) setelah ada usulan itu kan nanti di lakukan survei lokasi seperti kegiatan lingkungan terutama lingkungan *nggih* (begitu) lingkungan *meniko* (itu) dilakukan survei lokasi untuk *mereng-reng* (menafsir) berapa pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan *kados* (seperti) paving terus saluran *nggih nopo* (iya apa) rehap rumah *malih nggih* (lagi) WC”. (AN: Januari 2014)

Berdasarkan pada keterangan informan AN diatas, dapat diketahui bahwa perencanaan kegiatan yang ada dalam PNPM MP Desa Jatimulyo sudah melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat sudah dimulai pada kegiatan refleksi kemiskinan dan juga kegiatan pemetaan swadaya (lihat Lampiran 8 Siklus Masyarakat). Selanjutnya informan T menjelaskan seperti berikut:

“Ee tidak berpengaruh selama saya mendampingi ee mereka (masyarakat dan BKM) ini ee semua ikut mengambil bagian”. (T: Januari 2014)

Menurut keterangan informan T, dapat kita ketahui bahwa masyarakat secara sadar dalam hal ini (perencanaan) cukup aktif dan berkontribusi, serta masyarakat memiliki kepercayaan diri dan tidak merasa canggung saat diberikan kesempatan. Begitupun dengan BKM Mulyo Lestari juga menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Peran pertama yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif. Kegiatan ini dilakukan BKM Mulyo Lestari untuk merumuskan program-program apa saja yang akan direalisasikan oleh PNPM MP dalam waktu dekat. Seperti penjelasan informan AP berikut ini:

“Musyawarah di balai desa yang di undang 80 yang datang 62 kan sudah 50% lebih kan itu sudah artinya sudah kuorum itu yang *nggak* (tidak) datang karena ada halangan. Yang *ngundang* (mengundang) BKM diedarkan sekertaris ke masyarakat (KSM). *Yo* (ya) masalah P2KPlah kalau untuk hari ini yah masalah 1M dengan RW 7 *heem* (iya) terkait PLPBK.” (AP: Januari 2014)

Berdasarkan keterangan informan AP diatas, dapat diketahui bahwa bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini cukup bagus. Masyarakat berkumpul di balai desa untuk membicarakan kegiatan PNPM MP yang difasilitasi oleh BKM.

Masyarakat berkumpul di balai desa untuk membicarakan kegiatan PNPM MP yang difasilitasi oleh BKM.

Sementara informan AM menjelaskan seperti berikut:

“Iya kalau di adakan forum dengan masyarakat itu biasanya kita membicarakan soal program-program terus masyarakat didorong memberikan gagasannya. Bagaimana? Iya seperti itu usulan masyarakat nanti ditindaklanjuti di rapat tanggal 13.” (AM: Desember 2013)

Berdasarkan pada keterangan informan AM di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pengorganisasian masyarakat, BKM Mulyo Lestari mendorong masyarakat untuk mengeluarkan gagasannya berupa usulan.

Dari penjelasan kedua informan diatas memperlihatkan bahwa kegiatan mengorganisasikan masyarakat dilakukan untuk ajang berkumpulnya warga kelurahan/desa untuk melakukan rembug atau musyawarah merumuskan dan menyatukan aspirasi. Bila dilihat secara teliti, kegiatan ini untuk menyadarkan,

mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengelola masalah beserta solusi atau jalan keluarnya. Seperti yang dijelaskan Ross Murray (2000) menjelaskan pengorganisasian masyarakat adalah Suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan - kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan - kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan - kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber - sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.

Berdasarkan keterangan informan diatas, dapat diketahui Jika kita kaitkan dengan peran Pekerja Sosial yang di jelaskan oleh Zatrow dalam Hariyanto di bab 2 halaman 23 bahwa yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari termasuk dalam peran Pekerja Sosial sebagai koordinator (*Coordinator*). Dalam hal ini Pekerja Sosial melibatkan seluruh komponen bersama-sama secara terorganisir untuk menyelesaikan permasalahan klien. Sebagai koordinator, BKM Mulyo Lestari berperan sebagai penggerak dan pengatur jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan PNPM MP berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mengumpulkan dan menggali kebutuhan masyarakat dalam forum terbuka, diawali dengan BKM Mulyo Lestari mengundang sejumlah pihak dari berbagai unsur seperti Pemdes dan masyarakat terutama masyarakat miskin ke balai desa selanjutnya dalam kegiatan ini anggota BKM Mulyo Lestari yang telah dibagi sesuai fungsi dan tugasnya menjelaskan maksud dan tujuan dari diselenggarakannya forum tersebut. BKM Mulyo Lestari memimpin jalannya forum untuk selanjutnya masyarakat diarahkan berdiskusi dan memberikan tanggapan serta masukan sesuai dengan topik yang disepakati, dalam tahap ini BKM Mulyo Lestari sekaligus menjalankan fungsi Pekerja Sosial sebagai *group facilitator* (fasilitator grup). Dalam fasilitator grup, Pekerja Sosial berfungsi sebagai pemimpin untuk diskusi kelompok bersama klien. Jika tahap ini telah selesai selanjutnya dibuat pengkategorian kebutuhan dan prioritas kebutuhan yang akan direalisasikan sebagai program.

4.3.2 Dewan Pengambilan Keputusan

BKM sebagai dewan pengambil keputusan, merupakan salah satu fungsi BKM sebagai penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin. Peran sebagai dewan pengambil keputusan ini diberikan kepada BKM Mulyo Lestari karena memiliki legalitas dari masyarakat untuk memimpinya dan mewakilinya. Seperti yang diungkapkan oleh informan AN sebagai berikut:

“*Nopo maneh niki mbak* (apa lagi ini mbak), kalau kegiatannya BKM selama ini yah mereka hanya menjalankan program kerjanya. Kalau di ekonomi itu misalkan ada pencairan untuk KSM selain UPK, BKM juga hadir membantu disana selain itu mereka juga yang menentukan kelayakan KSM yang menerima pinjaman mbak jadi proposal-proposal dari KSM itu yang memeriksa (verifikasi) BKM apakah kelompok ini layak diberi dana atau tidak. Iya, kalau ee KSMnya macet kan otomatis *nggih* (iya) dana juga macet itu mereka harus benar-benar selektif *nggih* (iya). *Nggih* (iya) jadi proposal itu dibuat sendiri oleh KSM dan di cek BKM. Dan dana ini di *anu* di pantau *ngoten* (begitu) berapa jumlahnya dimasyarakat dan untuk usaha apa. *Nggih* (iya) nah sifatnya *nggih* (iya) KSM itukan sifatnya ee kelompok mbak *nggih* kelompok swadaya masyarakat artinya dalam pengajuan di kegiatan ekonomi itu sesuai yang ada di kegiatan kelompoknya itu memang untuk saat ini untuk KSM di ekonomikan seperti kegiatan usahanya kan masih perorangan belum belum muncul satu kegiatan yang sama itu di kelola bersama-sama artinya *anu* disini masih ee kegiatan perorangan usaha perorangan jadi 1 KSM itu ada kesepakatan membentuk kelompok yang latar belakangnya sama dalam lingkungan setempat lalu mengajukan dana *lajeng* (setelah itu) itu yang setiap mengajukan dana ke UPK *niku* membuat proposal sendiri *nggih* jadi semua kegiatan yang ada di KSM ini untuk pengajuan dananya itu berangkat dari usulan yang kemarin sekaligus proposal hehehe *monggo* mbak di *unjuk*. *Nggih* (iya) kebetulan BKM Jatimulyo merintis prakoperasi *nggih* (iya) paguyupan kegiatane *nggih* (yah) simpan pinjam *sing* (yang) pinjam *nggih* BKM UP UP *niku* (itu), Jadi BKM tidak menyentuh dana BLM mbak. *Nggih* ada juga mbak BKM ditempat lain yang ikut meminjam dana bergulir, tapi kalau Jatimulyo ini tidak bisa.” (AN: Januari 2014)

Dari penjelasan informan AN diatas dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh BKM Mulyo lestari dalam hal pengambilan keputusan adalah dengan pengambilan kebijakan seperti memutuskan kegiatan mana yang akan di danai baik itu berupa kegiatan lingkungan, sosial maupun ekonomi. Keputusan ini tidak begitu

saja diambil namun di dasarkan atas usulan warga dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu yang telah disepakati serta didasarkan pada prinsip yang dijunjung tinggi BKM seperti demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Jadi melalui peran ini BKM Mulyo Lestari berusaha untuk menjaga ketepatan sasaran program sehingga tidak merugikan masyarakat nantinya. Sementara informan AS menjelaskan seperti berikut:

“Perannya itukan melibatkan diri di setiap programnya P2KP dengan tidak mengharapkan imbalan sepeserpun yah memang tidak dibayar. Yang BKM itu biasanya tim em apa yah perencana. Jadi setiap tanggal 13 itu ada rapat rutin yang dihadiri oleh BKM itu. Agenda utamanya adalah mebicarakan tentang bantuan dana bergulir dan program-program yang ada. Tugasnya iya itu tadi kan di PNPM itu ada PJM jangka pendek menengah nah itukan di yang menyusun itukan BKM atas dasar masukan dari warga. Misal jika ada dana lagi itu akan digunakan untuk apa. Yah menghadiri rapat-rapat karena bersinergi dengan Pemdes berhubungan langsung dengan BAPPEDA. Peran utamanya yah merencanakan apa yang akan dilakukan dilingkungan.”(AS: Desember 2013)

Menurut informan AS, BKM Mulyo Lestari mempunyai kewajiban dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menyusun program berjangka. Kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang di dapat dari hasil proses pengorganisasian masyarakat (identifikasi).

Dari penjelasan kedua informan diatas, BKM Mulyo Lestari bertindak sebagai perencana sosial dan pengambil keputusan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa baik berupa kegiatan lingkungan, sosial maupun ekonomi. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan harus melewati tahap diagnosa, seleksi tindakan dan implementasi. Seperti sebelum mengambil keputusan terlebih dulu BKM Mulyo Lestari mendiagnosa masalah atau kebutuhan apa yang diperlukan dan mendesak dimasyarakat melalui pelaksanaan pengorganisasian masyarakat yang dikemas dalam musyawarah dan forum-forum masyarakat. Dari proses ini didapatkan berbagai gagasan atau usulan masyarakat yang bermacam-macam, kegiatan ini tidak hanya untuk menggali gagasan tetapi juga untuk memunculkan satu gagasan yang mewakili kepentingan bersama. Pada proses terakhir, BKM Mulyo Lestari melaksanakan rapat

anggota BKM untuk memutuskan kegiatan mana yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. William R. Dill (Bab 2 halaman 17) mengatakan bahwa pembuatan keputusan merupakan proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah.

Berdasarkan pada keterangan kedua informan diatas, maka BKM Mulyo Lestari berperan sebagai pengambilan keputusan dengan menjalankan fungsi pengambilan kebijakan dan sebagai perencana sosial. Dalam hal ini BKM Mulyo lestari melakukan peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dan perencana sosial. Menurut Suharto (bab 2 halaman 27) fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Peran sebagai fasilitator ini terlihat dalam dibuatnya kebijakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan lingkungan, ekonomi dan sosial. Sementara Adi (bab 2 halaman 22) menjelaskan Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis, dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Peran sebagai perencana ini terlihat dalam kegiatannya menyusun program-program berjangka.

4.3.3 Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur

Selain sebagai pelaksana program, BKM juga berperan mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur. Peran yang dilakukan BKM disini melaksanakan dan memberikan contoh di masyarakat melalui penerapan nilai-nilai luhur tersebut kedalam dirinya baik saat menjalankan program maupun dalam kesehariannya. Penerapan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis ini dapat dengan mudah kita jumpai pada penyelenggaraan perencanaan partisipatif seperti pada penentuan skala prioritas yang dikenal juga dengan nama perangkaan usulan. Kegiatan penentuan skala prioritas ini terdapat dalam kegiatan musyawarah untuk menentukan kegiatan yang bisa dilakukan PNPM MP untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam menentukan skala prioritas ini harus melihat pada

beberapa aspek seperti kegiatan yang dilakukan berdampak langsung bagi masyarakat, dapat dikerjakan masyarakat, tingkat keberlanjutan kegiatan, tersedianya sumberdaya dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Adapun peran BKM dalam hal ini adalah memfasilitasi kegiatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan AS:

“Sebelum kegiatan itu *ngundang* rapat masyarakat (KSM) dulu, masyarakat (KSM dan warga setempat) mengusulkan lingkungannya yang rusak apanya dicatat terus *direngking* (dirangking) disusun mana yang perlu diprioritaskan. BKM hanya memantau, memberi arahan, membantu mereng-reng kerusakannya. Biar biar nanti dananya tidak dilebih-lebihkan. Usulan itu semua ya dari masyarakat saja”(AS: Desember 2013).

Dari apa yang diungkapkan informan diatas sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu BKM Mulyo Lestari mengadakan musyawarah dengan KSM untuk menentukan dan menjamin ketetapan sasaran dengan menggunakan metode skala prioritas. Dalam penentuan skala prioritas ini tiap-tiap KSM diwajibkan untuk memberikan usulan sesuai dengan hasil rapat lingkungan dengan anggotanya. Dalam hal ini, BKM Mulyo Lestari hanya memfasilitasi dan tidak turut campur di dalamnya. Hal ini juga diungkapkan oleh informan AN:

“*Nggih* (iya) penyamaannya itu nanti dari masyarakat masing-masing ee kriteria disepakati secara keseluruhan, maksudnya ditingkat desa itu ada kesepakatan bahwa ini loh yang masuk kriteria. Setelah disepakati lalu diproses BKM. Misalnya untuk kegiatan ekonomi bergulir BKM melakukan pengecekan usaha yang dilakukan KSM apakah benar ada, kurang apa nanti dibantu lagi, bagaimana usahanya. Jadi BKM memastikan agar bantuan ini tepat”(AN: Januari 2014)

Terkait dengan pendapat informan diatas, bahwa BKM Mulyo Lestari tidak serta merta menentukan program, setiap program diawali dari kebutuhan masyarakat yang diungkapkan dalam hasil penentuan skala prioritas. Jika kita amati, dalam kegiatan penentuan skala prioritas ini BKM Mulyo Lestari harus memaksimalkan fungsinya dan bekerja keras seperti BKM Mulyo Lestari harus menghidupkan forum, mendorong masyarakat mengeluarkan masalahnya, mendorong masyarakat untuk memberikan solusi, bersikap adil, serta menjaga masyarakat untuk bersikap peduli pada lingkungan yang lebih membutuhkan. Hal ini sesuai dengan sifat kolektifitas BKM, yaitu Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat

kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. (Departemen Pekerjaan Umum, Tanpa tahun).

Dalam kaitannya dengan kegiatan musyawarah partisipatif penentuan skala prioritas ini, menurut Ilmu Kesejahteraan Sosial BKM Mulyo Lestari telah menjalankan peran sebagai fasilitator dalam sudut pandang Pekerja Sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Suharto (bab 2 halaman 27) bahwa Peran sebagai pemungkin atau fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

4.3.4 Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Strategi memberdayakan masyarakat miskin merupakan salah satu upaya yang dilakukan PNPM MP dalam menanggulangi kemiskinan. Seperti yang dijelaskan Payne (dalam Fahrudin, 2011 bab 2 halaman 20) bahwa suatu proses pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam program Tridaya yaitu daya ekonomi, sosial dan lingkungan.

a. Ekonomi

Kegiatan Tridaya bidang ekonomi atau daya ekonomi adalah kegiatan yang berwujud pemberian pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir ini berskala mikro yang diberikan pada masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM yang belum dapat mengakses pinjaman pada lembaga keuangan. Pemberian bantuan didasarkan pada beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan BKM yang pelaksanaannya tergantung masyarakat. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi bergulir ini BKM Mulyo Lestari dibantu oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang pengoperasionalnya terpisah dari BKM. Berdasarkan laporan rincian permodalan dana bergulir BKM Mulyo Lestari, pada tahun 2013 BKM Mulyo Lestari dapat menggulirkan dana untuk ekonomi bergulir sebesar Rp. 11.500.000 yang terbagi kedalam dua tahap. Tahap pertama dapat merealisasikan dana sebesar 3.750.000 yang bersumber dari dana swadaya dan BLM. Pada tahap kedua BKM mulyo lestari dapat merealisasikan dana sebesar 7.750.000 dengan sumber yang sama. pencairan dana ekonomi bergulir ini dilakukan di balai Desa Jatimulyo. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai modal usaha, diantaranya seperti modal membuka toko kelontong, modal membuka jasa menjahit dan modal untuk membesarkan usaha yang telah ada.

Peran yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya dalam daya ekonomi adalah dengan memberikan bantuan modal ke masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok KSM melalui ekonomi bergulir. Dalam kegiatan ini peran BKM Mulyo Lestari adalah melakukan seleksi proposal dan memantau keuangan. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh informan AN sebagai berikut:

“Kalau di ekonomi itu misalkan ada pencairan untuk KSM selain UPK BKM juga hadir membantu disana selain itu mereka juga yang menentukan kelayakan KSM yang menerima pinjaman mbak jadi proposal-proposal dari KSM itu yang memeriksa BKM apakah kelompok ini layak diberi dana atau tidak. Iya, kalau ee KSM-nya macet kan otomatis *nggih* dana juga macet itu mereka harus benar-benar selektif *nggih*. *Nggih* jadi proposal itu dibuat

sendiri oleh KSM dan di cek BKM. Dan dana ini di *anu* di pantau *ngoten* berapa jumlahnya dimasyarakat dan untuk usaha apa”(AN: Januari 2014)

Lebih lanjut informan AN menjelaskan:

“Tahun 2012 kemarin untuk kegiatan sosial itu untuk pelatihan pelatihan pakan ternak itik terus setelah itu juga ada untuk penambahan gizi balita kalau yang di penambahan gizi balita ini diambilkan dari dana alokasi mbak jadi bukan dana dari BLM dari hasil laba UPK setiap tahun itu dialokasikan untuk kegiatan lingkungan sosial terus penambahan ekonomi kalian pengawas di UP. Jadi laba dari pinjaman UPK itu setiap akhir tahun dialokasikan untuk kegiatan itu” (AN: Januari 2014).

Sementara informan AM menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya boleh berkomentar, kesulitan itu pasti ada. Seperti rapat BKM malam kemarin ada segelintir KSM yang nunggak. Ini masalah, kita upayakan pengembalian KSM ini selalu lancar. Kemarin itu sudah didatangi tapi masih janji-janji, rencananya saya akan kesana janji-janji biar jelas kenapa kok nunggak.”(AM: Desember 2013)

Berdasarkan pada penjelasan informan M diatas, peran BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan ekonomi adalah mengupayakan kelancaran jalannya kegiatan ekonomi bergulir dengan cara menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari tahu dan memastikan kejelasannya terkait penunggakan kelompoknya hal ini sebagai upaya kontroling dari BKM Mulyo Lestari.

Apa yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari ini sesuai dengan yang ada dalam panduan petunjuk teknis pinjaman bergulir yang menyebutkan bahawa, Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. Bila dilihat secara teliti dalam hal ini ada beberapa peran Pekerja Sosial yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari yaitu sebagai *researcher, enabler dan broker*. Seperti yang diungkapkan Zastrow dalam bab 2 halaman 22 bahwa sebagai *researcher* Pekerja Sosial disini dapat menjadi peneliti. Dalam penelitian dapat melibatkan informasi dari membaca literatur, topik-topik penting, melakukan evaluasi dan mempelajari kebudayaan masyarakat. Peran sebagai *researcher* ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan BKM dalam mencari tahu penyebab kemacetan KSM dalam membayar tagihan pengembalian dana bergulir. Peran sebagai *enabler*, Dalam hal ini pekerja sosial membantu individu dan

kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah klien dan mengembangkan kapasitas klien untuk memahami masalah. Peran ini terlihat dari upaya yang dilakukan BKM untuk menjaga kelancaran kegiatan ekonomi bergulir agar tetap bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Terakhir adalah peran sebagai *broker*, Menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat tetapi tidak tahu bagaimana dan dimana mendapatkan bantuan tersebut. Peran ini terlihat dari di selenggarakannya kegiatan ekonomi bergulir untuk masyarakat miskin yang belum mendapat akses keuangan yang tergabung dalam KSM dan pemanfaatan laba ekonomi bergulir sebagai sumber pembiayaan program atau kegiatan-kegiatan BKM Mulyo Lestari.

Pengawasan proses kegiatan ekonomi dilakukan sejak penentuan kelayakan (pengecekan) usulan kegiatan/proposa yang di usulkan oleh masyarakat. Selanjutnya dilakukan pengecekan melalui data pemetaan swadaya yang juga digunakan sebagai acuan penerima bantuan. Pengawasan ini juga dilakukan dengan cara kunjungan lapang (mendatangi calon penerima), pelaporan KSM dan juga rapat penentuan prioritas. Pengawasan kegiatan ekonomi ini juga dilakukan ditubuh KSM khususnya KSM ekonomi, dalam setiap KSM terdapat ketua kelompok/koordinasi yang mengkoordinir dana dan juga melakukan pelaporan pada BKM, pelaporan KSM ekonomi ini berbentuk catatan kegiatan kelompoknya dan juga laporan yang disuguhkan dalam bentuk verbal.

b. Lingkungan

Kegiatan Tridaya bidang lingkungan atau daya lingkungan adalah kegiatan yang berorientasi pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk perumahan/pemukiman dasar yang berada di lokasi sasaran dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan/pemukiman yang direalisasikan harus memnuhi unsur-unsur seperti sehat, layak, terjangkau, aman, terartur, serasi dan produktif. Untuk menjalankan kegiatan lingkungan ini, BKM Mulyo Lestari dibantu oleh UPL (Unit Pengelola Lingkungan) yang bertanggung jawab secara langsung

pada BKM. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan 2013 BKM Mulyo Lestari melaksanakan kegiatan paving untuk jalan dan gang, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan saluran air.

Peran yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya dalam daya lingkungan yaitu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui pembangunan atau penataan kembali pemukiman. Sebagaimana yang di jelaskan oleh informan AS berikut:

“Program-programnya kan ada tiga itu fisik (lingkungan), sosial dan ekonomi. Fisiknya direalisasikan dengan pembangunan rumah atau daerah kumuh yang kemudian di jadikan tidak kumuh, yang belum sehat di sehatkan yang biasanya buang air di sungai sekarang tidak lagi.”(AS: Desember 2013).

Sementara informan P menjelaskan sebagai berikut:

“Apa lagi yah mbak, yah hanya itu seperti melebarkan jalan, rapat BKM soal lingkungan, rapat undangan kantor desa, ini PLPBK masih setengah saya di bagian WC dengan mbak I.(AP: Januari 2014)”

Dari apa yang dijelaskan informan AP, untuk kegiatan daya lingkungan BKM Mulyo Lestari hanya melakukan kegiatan pelebaran jalan dan rapat dengan sesama anggota BKM terkait kegiatan lingkungan. Dari kegiatan yang dilakukan oleh anggota BKM Mulyo Lestari ini sesuai dengan tujuan kegiatan lingkungan yang terdapat dalam pedoman teknis kegiatan Tridaya yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan lingkungan dan permukiman.

Dari penjelasan kedua informan diatas, dapat kita ketahui bahwa BKM Mulyo Lestari dalam hal ini hanya mengusahakan program-program atau kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan kondisi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan program lingkungannya. Melihat pada Ilmu Kesejahteraan Sosial maka peran ini disebut sebagai fasilitator. Menurut Suharto (dalam pembahasan bab 2 halaman 27) fasilitator disebut juga sebagai pemungkin. Hal ini berkaitan dengan peran BKM Mulyo Lestari sebagai fasilitator karena BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan lingkungan memfasilitasi kebutuhan

masyarakat akan fasilitas yang baik berupa pemukiman dasar dan infrastruktur yang layak untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Sosial

Kegiatan Tridaya bidang sosial atau daya sosial adalah kegiatan yang berorientasi pada membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara meningkatkan potensi masyarakat terutama masyarakat rentan dan marginal yang kurang beruntung.

Sasaran dari kegiatan sosial ini adalah KK miskin yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam pemetaan swadaya yang terbaru. Pemetaan swadaya sendiri adalah bagian dari siklus masyarakat yang ada di PNPM MP (siklus masyarakat lihat Lampiran 9). Data pemetaan swadaya ini di perbarui secara berkala dan jelas identitasnya (nama dan alamatnya). Data pemetaan swadaya ini tidak hanya digunakan untuk acuan penerima kegiatan sosial, namun juga untuk kegiatan lainnya seperti ekonomi dan juga lingkungan. Berikut adalah kelompok KK (KK miskin) yang masuk dalam pemetaan swadaya:

Gambar 4.3 Kriteria Warga yang Masuk Pemetaan Swadaya

KK miskin yang mempunyai balita dan anak usia sekolah <u>wajib belajar 9 tahun</u> namun tidak memiliki kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	USIA SEKOLAH
KK miskin yang berusia produktif tapi tidak berpendapatan tetap, belum memiliki pekerjaan dan ketrampilan serta tidak memiliki akses kesehatan seperti perawatan.	USIA PRODUKTIF
KK miskin yang tidak lagi produktif yang tidak memiliki pendapatan tetap ataupun jaminan hari tua, memiliki ketergantungan tinggi, dan tidak memiliki akses kesehatan.	USIA TIDAK PRODUKTIF

Sumber: diolah dari buku pedoman pelaksanaan PNPM MP, oleh penulis 2014

Pelaksanaan pemetaan swadaya yang dilakukan di Jatimulyo dilakukan setelah tahapan persiapan selesai. Tahap pemetaan swadaya atau PS dilakukan ditingkatan desa dan melibatkan seluruh warga Jatimulyo yang telah dewasa. Dalam kegiatan PS warga Jatimulyo diarahkan untuk menggali potensi yang ada dilingkungannya termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan. PS juga dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengkaji permasalahan yang ada dilingkungan beserta solusinya. Dari kegiatan PS ini juga di dapatkan data-data KK miskin berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh warga Jatimulyo seperti salah satunya adalah warga miskin yang masih memiliki tanggungan anak usia sekolah/balita. Seperti yang dijelaskan oleh informan AN dibawah ini:

“Setelah proses itu dilalui (tahap persiapan) kemudian ee masyarakat se-Jatimulyo melakukan pemetaan swadaya yang isti..*singkatanipun* (istilahnya) PS. *Nggih* (iya) didalam PS *niku* (itu) masyarakat menggali potensi yang ada dilingkungan masing-masing ada persoalan terkait lingkungan sosial maupun tingkatan ekonomi. Jadi persoalan disitu apa disetiap masing-masing RT itu melakukan kajian permasalahannya apa terus solusinya bagaimana itu dituangkan dalam ee kegiatan PS. Termasuk *milah-milah* (memilah-milah) KK miskin, KK miskin yang termasuk *dilingkunganne* (dilingkungannya) misalkan lingkungan Patek *nggih* (iya) RW 7 *niku* (itu) yang masuk KK miskin *niku* (itu) sinten. *Niku* (itu) juga melihat acuan dari hasil RK yang terdahulu. Ciri-ciri kemiskinan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. *Nggih* (iya) kriteria kemiskinan *niku* (itu) yang menentukan masyarakatnya mbak tapi juga dilihat untuk *nopo acuan nipun* (apa acuannya) juga bisa dari data desa. Misalkan dari program *nopo* (apa) JAMKESMAS ataupun PKH bisa dijadikan acuan”. (AN: Januari 2014).

Adapun kegiatan sosial yang telah direalisasikan oleh BKM Mulyo Lestari seperti yang dikutip dari laporan kegiatan sosial yang dilakukan BKM Mulyo Lestari tahun 2013 adalah pemberian beasiswa, penggemukan kambing, ternak puyuh dan unggas bergulir. Selain itu untuk bidang sosial BKM Mulyo Lestari juga melakukan

bantuan untuk jompo, satuan anak yatim dan kerjasama dengan posyandu yang ada di Jatimulyo untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan balita. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan AP berikut ini:

“Ada banyak kambing bergulir, unggas bergulir rehab rumah santunan dari apa itu posyandu itu dari P2KP juga ada bantuan banyak mbak program”(AP: Januari 2014).

Selanjutnya informan AS menerangkan dalam wawancaranya seperti berikut:

“Kalau sosialpun juga banyak seperti beasiswa anak sekolah kemudian *anu ee* orang jompo, memberikan santunan anak yatim, beasiswa untuk anak SMP terus memberikan pinjaman modal di ekonomi bergulir”.(AS: Desember 2013)

Dari penjelasan kedua informan diatas memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan BKM Mulyo Lestari dalam pelaksanaan kegiatan sosial adalah menyediakan program-program bantuan sebagai bentuk dari intervensinya untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang masuk atau terdaftar kedalam daftar pemetaan swadaya dengan memberikan program seperti beasiswa sekolah, bantuan jompo, santunan anak yatim, kambing bergulir dan posyandu untuk kesehatan balita. Untuk bantuan beasiswa sekolah, diberikan kepada siswa miskin yang belum menerima beasiswa dari pihak lain.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari ini sesuai dengan yang ada dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tridaya yaitu “Meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, mudah, dan berkualitas tidak terkecuali kesehatan balita, kesehatan ibu, terbebas dari penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Serta poin “Meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan pendidikan (wajib belajar 9 tahun)”. Jika dilihat dari sudut pandang peran yang mereka lakukan maka menurut Suharto dalam bab 2 halaman 27 BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai *fasilitator* dan *broker*. Peran sebagai *fasilitator* ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari yaitu memfasilitasi masyarakat miskin untuk

dapat menikmati dan mengakses pendidikan dengan meluncurkan dan menjalankan program pemberian bantuan berupa beasiswa yang menyasar pada siswa miskin. Selain itu hal ini juga terlihat pelaksanaan program bantuan santunan untuk jompo dan santunan untuk anak-anak yatim piatu. Peran sebagai *broker* terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dalam kegiatan melakukan kerjasama dengan posyandu untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang lebih baik lagi dengan menyasar pada ibu dan balita.

Pemantauan proses pelaksanaan kegiatan sosial ini dilakukan dengan cara menentukan kelayakan penerima kegiatan sosial dengan melakukan pengecekan ke warga yang masuk dalam daftar pemetaan swadaya. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan ke rumah calon penerima bantuan kegiatan sosial dan juga pengecekan kesekolah calon penerima bantuan untuk mengkroscek apakah siswa calon penerima bantuan kegiatan sosial ini telah menerima beasiswa dari pihak lain (kunjungan lapang). Setelah menerima programpun masih dilakukan pengawasan apakah ada perkembangan kondisi dari pihak penerima bantuan.

4.4.5 Mengembangkan Jaringan

Mengembangkan jaringan atau dikenal dengan istilah *channeling* dalam PNPM MP merupakan salah satu kegiatan BKM untuk mengkondisikan agar BKM mampu mencukupi dirinya dengan bantuan pihak luar dalam bentuk bantuan atau kerjasama. Inti dari kegiatan *channeling* adalah mendorong kemitraan BKM dengan *stakeholder*. Pelaksanaan program *channeling* atau kemitraan merupakan salah satu bukti telah terjadi kemandirian dalam BKM. Dalam hal *channeling* ini BKM bisa melakukan kerja sama baik dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Adapun kegiatan *channeling* yang pernah dilakukan oleh BKM adalah menjalin kerjasama dengan satuan kerja yang ada di Tulungagung. Seperti yang dijelaskan oleh informan AM berikut ini:

“Selain PLPBK juga ada kegiatan *channeling* dengan satuan-satuan kerja yang ada di daerah Tulungagung tapi ini dalam proses. Kita disuruh sabar

menunggu hasil *channeling*, agar desa ini bisa berubah positif sesuai dengan visi misi BKM Mulyo Lestari” (AM: Desember 2014).

Selanjutnya informan AS menjelaskan:

“Setahu saya Pemdes itu juga sangat mendukung dengan adanya PNPM itu buktinya ada AGDnya desa bisa digabungkan untuk mengambil dana yang lebih besar dari Pemda. Karena ada sayembara dari Pemda itu jika ada yang bisa mewujudkan 25% dana itu prosentasenya 25% dari desa 75% dari Pemda itu akhirnya di gabung 100% untuk diambil dana yang 100% itu. Oh awalnya begini saling punya ego sendiri-sendiri dari BKM merasa punya dana dan Pemdes juga akhirnya ada benturan tapi ahirnya masing-masing itu sadar kita akan membangun desa jadi membangun desa itu tidak mungkin membangun sendiri-sendiri dan yang diambil itu butuh pancingan dari Pemda itu iniloh ada dana 100% ambilah dengan dana 25% kalau bisa bawa pulang ini 100%. Dulu itu dari Pemda itu ada dana seratus juta terus dari desa itu harus punya 25% dari seratus juta itu agar bisa melakukan pavingisasi disini. Pemerintah sudah ada *anu* program *sharing* dari PNPM MP itu otomatis program PNPM itu program desa juga.” (AS: Desember 2014)

Seperti yang dijelaskan oleh informan AS diatas, BKM Mulyo Lestari juga mengadakan *channeling* dengan pihak pemdes hal ini dilakukan untuk mengakses sumber bantuan. Dengan berjalannya *channeling* atau kerjasama ini menjadikan BKM sebagai lembaga yang mandiri. Selain menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, BKM Mulyo Lestari bersama pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti yang dilakukannya dengan salah satu pabrik yang ada di Tulungagung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan SG seperti berikut:

Informan SG

“Kita dan PNPM (BKM) ya mengajukan proposal kerja sama dengan pabrik X yah untuk membantu penerangan jalan yang ada disebelah selatan, ya mulai dari rumah bapak X sampai jalan setono waru kuburan situ mbak. *Hooh* (iya) situ kan ya masih sedikit lampunya apa lagi jalan besar. Ya ini kan *anu* kemarin itu pak X yang pernah kerja di pabrik X itu ya bilang kalau pabrik bisa bantulah soalnya ada program apa ya itu CSR. Sebelum jadi lurah saya kan juga kerja disitu mbak hehehe jadi ya *insyaallah* bisa mbak bantuannya. Apa lagi kalau pas *wayahe* (waktunya) gilingkan debunya itu terbang ke utara *ta* (kan) otomatis jatuhnya juga di sini hehehe.”(SG: Januari 2014)

Dari apa yang telah dijelaskan diatas menggambarkan bahwa untuk mempermudah dan mempercepat tujuan BKM Mulyo Lestari memperluas jaringannya dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti Pemdes dan satuan pemerintah

yang ada di Tulungagung. Kerjasama ini tidak hanya terbatas dengan pemerintah tapi juga dilakukan dengan pihak swasta. Walker dalam bab 2 halaman 21 menjelaskan bahwa kerjasama dalam bekerja ditujukan untuk mencapai keberhasilan dengan tidak mendasarkan pada kepentingan pribadi tetapi lebih utama untuk kepentingan bersama menyamakan kepentingan dengan yang lain yang bersifat kepercayaan mutualistik dengan tujuan akhir kerjasama yang efektif.

Jika melihat dari penjelasan diatas, BKM Mulyo Lestari dalam hal *channeling* hanya membangun dan menjalankan kerjasama dengan pihak luar untuk dapat mengakses bantuan berupa modal ataupun lainnya melalui kerjasama yang disepakati. Jika melihat dari sudut pandang peran yang BKM Mulyo Lestari lakukan maka menurut Suharto dalam bab 2 halaman 27, dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai *broker*.

4.4.6 Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Dalam mengawasi pemanfaatan dana BLM, kegiatan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah dengan mengecek dan memantau langsung kelokasi sasaran program (lihat Lampiran 5 gambar 4). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan AP sebagai berikut:

“Kalau dibangun (program kegiatan lingkungan) saya selalu datang, tapi percaya atau tidak mbak orang sebanyak itu hanya saya yang perempuan disana. Jalan yang jurusannya Ngledok (Desa tetangga) itu setiap hari saya kesana menunggu (memantau kegiatan) sendiri mbak. Namanya perempuan membantu sebisanya apa yang perlu.”(AP: Januari 2014)

Sementara informan AS mengatakan seperti berikut:

“Biasanya dibahas waktu tanggal 13 itu bersama faskel dan anggota (BKM) lain juga ada perangkat dan kepala desa. Yah semuanya soal lingkungan, ekonomi semua program.”(AS Desember 2013)

Dari penjelasan informan AS menerangkan bahwa rapat sebulan sekali yang dilakukan tanggal 13 (RAK) sebagai bagian untuk melihat keefektifan realisasi dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkandung dalam Tridaya. Selain anggota BKM rapat ini dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti faskel, dan pemdes.

Dari penjelasan kedua informan diatas memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilakukan BKM Mulyo Lestari dalam mengawasi proses pelaksanaan BLM adalah dengan cara monitoring (mengawasi) kegiatan secara langsung ke lokasi program/kegiatan dan melalui RAK yang dilakukan di balai desa sebagai usaha dari evaluasi kegiatan. Kegiatan mengawasi proses pelaksanaan BLM untuk kegiatan lingkungan tidak terbatas pada kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga dilakukan koordinasi dan evaluasi yang dikemas kedalam sebuah forum masyarakat yang santai di pandu oleh BKM Mulyo Lestari dan dihadiri KSM dan masyarakat serta fasilitator (lihat Lampiran 5 gambar 9). Kegiatan seperti ini pengawasan proses BLM tidak terbatas pada kegiatan lingkungan saja, namun juga berlaku untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan ekonomi dan sosial.

Dalam kegiatan pengawasan proses BLM ini, BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai *broker* dengan menjalankan prinsip *Quality Control*. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto dalam bab 2 halaman 27. *Quality control* sendiri adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Dengan menjadi BKM, mereka bersama dengan masyarakat diberikan akses untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan lewat program-program berjangka yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin. Berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan BKM Mulyo Lestari berasal dari suara atau usulan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan berbagai peran yang dilakukannya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), secara umum BKM Mulyo Lestari telah dapat melaksanakan perannya baik dalam mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif, dewan pengambilan keputusan, mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur, menumbuhkan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin, mengembangkan jaringan dan mengawasi proses BLM. Maka di diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Masyarakat Secara Partisipatif: Pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif.
Kegiatan ini melibatkan masyarakat untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan menentukan prioritasnya serta berusaha untuk mencapainya dengan segala sumber daya yang dimiliki atau dengan bantuan luar. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan ini akan membiasakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan. Dalam kegiatan ini BKM Mulyo lestari menjalankan dua perannya yaitu: sebagai koordinator (penggerak dan pengatur) dan *group facilitator* (fasilitator grup). Sehingga dapat diketahui juga bahwa semua peran yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dewan Pengambilan Keputusan
Peran ini merupakan salah satu fungsi BKM Mulyo Lestari sebagai penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin di Jatimulyo. Peran ini otomatis melekat pada BKM Mulyo Lestari sejak

mereka dilantik. Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan dua perannya yaitu: sebagai fasilitator dan perencana sosial. Dengan menjalankan peran ini BKM Mulyo Lestari dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur

Penerapan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis ini dapat dengan mudah dijumpai pada penyelenggaraan perencanaan partisipatif, dalam kegiatan ini tidak ada batasan (ras, agama, status sosial) untuk pesertanya dalam memberikan gagasan seperti pada penentuan skala prioritas yang dikenal juga dengan nama perangkaan usulan. Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan peran sebagai fasilitator. dengan menjalankan peran fasilitator ini BKM Mulyo Lestari membantu masyarakat untuk terbiasa terlibat dalam kegiatan umum, membiasakan masyarakat untuk dapat mengenali masalah dan solusinya namun dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis.

4. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam Tridaya yaitu:

- a. Ekonomi: Kegiatan Tridaya bidang ekonomi berwujud pemberian pinjaman bergulir yang berskala mikro dengan sasaran masyarakat atau rumah tangga miskin yang belum memiliki akses pada lembaga bantuan modal usaha. Untuk mengakses bantuan ini sangat mudah, hanya dengan bergabung secara kelompok (KSM) dengan jumlah anggota yang telah disepakati dan mengajukan proposal bisnis/usaha ke BKM Mulyo Lestari. Dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah menjalankan peran sebagai *researcher*, *enabler* dan *broker*. Dengan menjalankan peran ini, BKM Mulyo Lestari telah menyediakan akses dengan cara mencaritahu sumber

masalah, mengupayakan solusinya dan menghubungkan masyarakat dengan sumber modal.

- b. Lingkungan: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk perumahan/pemukiman dasar yang berada di lokasi sasaran dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan peran sebagai fasilitator. Dengan menjalankan peran fasilitator, BKM Mulyo lestari telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan fasilitas insfrastuktur yang lebih baik lagi berupa pemukiman dasar maupun jalan yang lebih baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
- c. Sosial : Kegiatan ini berorientasi untuk dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara meningkatkan potensi masyarakat terutama masyarakat rentan dan marginal yang kurang beruntung. Sasaran dari kegiatan/program ini adalah KK miskin yang telah masuk dalam daftar pemetaan swadaya. Dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran sebagai fasilitator dan broker. Dengan menjalankan peran ini, BKM Mulyo lestari telah memfasilitasi dan menghubungkan masyarakat miskin dengan bantuan sosial yang tersedia. Dengan demikian maka masyarakat tetap dapat menjalani hidupnya.

5. Mengembangkan Jaringan

Kegiatan ini dilakukan BKM Mulyo lestari untuk mengkondisikan agar mereka mampu mencukupi dirinya dengan bantuan pihak luar dalam bentuk bantuan atau kerjasama. Sasaran dari kegiatan ini adalah mendorong adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian BKM. Dalam hal ini, BKM Mulyo Lestari melakukan perannya sebagai broker.

6. Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Proses pengawasan ini tidak lain adalah sebagai bukti pertanggungjawaban BKM Mulyo Lestari sebagai representasi masyarakat. kegiatan ini dilakukan dan dipantau bersama dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini, BKM Mulyo

Lestari telah melakukan peran broker dengan menjalankan prinsip *Quality Control*. *Quality control* dilakukan untuk menjamin bahwa program yang dihasilkan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu peningkatan lagi pada kegiatan *channeling*, sebaiknya menjalin kerjasama atau *channeling* dengan pihak pemerintah maupun swasta tidak hanya mencakup wilayah Tulungagung saja agar masyarakat mendapat bantuan baik itu pelatihan maupun berupa pendanaan.
2. Diharapkan BKM Mulyo Lestari dapat lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang telah dilakukan seperti program maupun perencanaan, agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sasaran.
3. Diharapkan BKM Mulyo Lestari lebih meningkatkan sosialisasi, kesadaran dan partisipasi lagi dari masyarakat Jatimulyo karena semua program/kegiatan yang ada berdasarkan usulan dan untuk masyarakat.

DAFTAR GLOSARIUM

Kata	Arti
<i>Channelling Program</i>	Program Kemitraan
<i>Executing Agency</i>	Penyelenggara
Fasilitator	Pendamping
Institusi	Lembaga
Kolektif	Istilah sosiologi yang mengandung pengertian cara orang bertindak dalam kerumunan dan kelompok
Korkot	Koordinasi Kota
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
MCK	Mandi Cuci Kakus
P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
PJM	Program jangka menengah
PK BKM	Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat
PMU	Project Manageent Unit
PNPM MP	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Representatif	Bersifat telah mewakili
Respek	Rasa menghargai orang lain
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
Siklus	Putaran Waktu Kejadian Yang Berulang Secara Tetap Dan Teratur
Standar Hidup	Kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dimiliki seseorang
<i>Steering kegiatan</i>	Pengarah kegiatan
Transformasi	Perubahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achlis. 1983. *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.
- Astuti, Mulia. 2003. *Model Bimbingan Bagi TKSM Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat: Pengembangan Konsep dan Uji Coba*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darmodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pekerjaan Umum. Tanpa Tahun. *Modul Tugas dan Fungsi BKM*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaiora.
- Hanif,dkk. 2009. *Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Hermawati, Istiana. 2001. *Metode dan Teknik Dalam Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Adicpta Karya Nusa.
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tanpa Tahun. *Pedoman Teknik Kegiatan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementarian Pekerjaan Umum.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. “*Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*”. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.
- Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Merphin. 2000. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta : BPK Gunung Mulia
- Moleong. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Refika Aditama
- Muller. Johannes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Plummer, J. 2000. *Elements Of Participation, Municipalities And Community Participation: A Sourcebook For Capacity Building*. London. Sterling. Va. Earthscan.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincolin. 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2005. *Menejemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan ‘Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ross, Murray G. 2000. *Community Organization; Theory, Principle And Practice 2d Ed*. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.
- Santoso. 1999. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya media.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- T.Draha. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bandung: Rineka Cipta.
- Tesoriero, Jim & Ife Frank. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walker, James W. 1992. *Human Resource Strategy*. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.
- World Bank. 2003. *East Asia Urban Working Paper Series, Kota-Kota Dalam Transisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia*. Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region The World Bank. Jakarta Yogyakarta: BPF

Internet

<http://kbbi.web.id/awas> diakses pada tanggal 17 Desember 2014

<http://kbbi.web.id/organisasi> diakses pada 15 September 2014

<http://sulut.kemenag.go.id/file/file/perencanaan/uohf1342056927.pdf> diakses pada tanggal 17 September 2014

<http://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301> Diakses pada tanggal 9 oktober 2014

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo34.htm. diakses pada tanggal 28 Agustus 2014

http://www.psikologizone.com/decision-making-pengambilan-keputusan/06511_842 diakses pada tanggal 15 September 2014

<http://www.unja.ac.id/fkip/index.php/kehidupankampus/opini-danartikel/117-penanamannilai-nilai-kejujuran> diakses pada tanggal 17 September 2014

Jurnal

Moordiningsih. Tanpa tahun. Jurnal Psikologi. Vol 33, No 2,1-15. “*Physician Decision Making*”. Universitas Gajah Mada.

Nasution. 2013. Jurnal Citizenship. Vol 1, No 1.” *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan*”. Universitas Medan.

National Society For The Study Of Education. 2006. “*Yearbook Of The National Society For The Study Of Education Volume 63, bagian 2*”. University Of Chicago Press.

Skripsi

Erwin permana. 2010. Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok). Tidak diterbitkan. Tesis. Program Sarjana Universitas Jember.

Hariyanto. 2011. Pelaksanaan Proses Rehabilitasi Sosial Untuk Anak Wanita Usia 15-18 Tahun Korban Trafficking: Studi deskripsi pada PSKW Mulya Jaya

Pasar Rebo. Tidak diterbitkan. Penerbit Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan
Sosial Universitas Indonesia.



LAMPIRAN 1

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah	
	1	2
Judul penelitian	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan	Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Study Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok).
Tahun penelitian	2013	2010
Keluaran lembaga	Jurnal Nasution Vol 1, No 1 (2013) FIS, Universitas Medan	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Pertanyaan penelitian	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan	<p>1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu LKM dalam melaksanakan program sehingga keberhasilan suatu LKM berbeda dengan LKM lain?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan program PNPM Mandiri tersebut sudah</p>

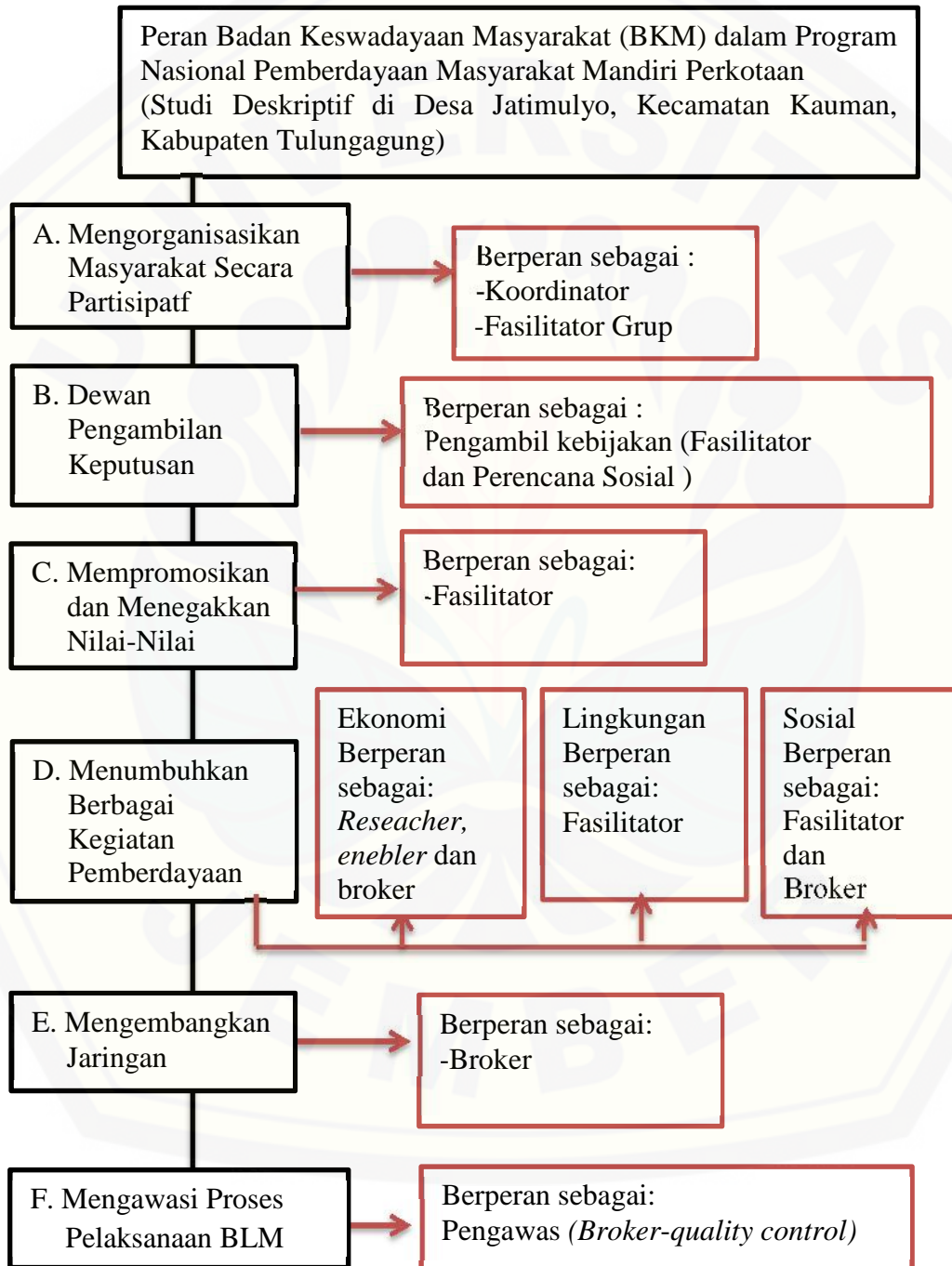
		<p>mencerminkan prinsip-prinsip <i>community-based development</i>?</p> <p>3. Bagaimana LKM mewujudkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri dalam kerangka pemberdayaan masyarakat?</p>
Temuan	<p>Kepala desa berperan sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri. Seperti : membantu memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri pada masyarakat di wilayahnya, turut menyelesaikan perselisihan dan penyelesaian masalah di masyarakat terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri, fasilitator proses penggalian gagasan di kelompok masyarakat dan dusun serta tahapan pelaksanaan lainnya di desa.</p>	<p>Terdapat perbedaan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan perkembangan LKM diantaranya: (1). pelaksanaan intervensi program PNPM Mandiri yang bersamaan dengan program lain sejenis, (2) adaptasi peralihan pola kepemimpinan pimpinan kolektif, (3) jika pimpinan kolektif LKM adalah orang-orang yang tidak bermasalah secara ekonomi maka tugas sebagai tenaga di LKM lebih bisa dilakukan, (4) LKM yang berprestasi lebih kondusif berkelanjutan, (5) konflik internal</p>
Metode	Kuantitatif	Kualitatif

Persamaan dengan penelitian ini	Membahas tentang PNPM Mandiri perkotaan	Membahas mengenai PNPM Mandiri perkotaan, LKM/BKM
Perbedaan dengan penelitian ini	Jurnal ini lebih fokus pada peran kepala desa dalam peningkatan pembangunan	Penelitian ini lebih fokus pada evaluasi program



LAMPIRAN 2

TAKSONOMI PENELITIAN



LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

(Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

Informan Pokok (BKM)

Pertanyaan :

1. Bisakah Bapak/Ibu sedikit bercerita tentang masyarakat dan desa ini?
2. Menurut Bapak/Ibu masalah apa yang dihadapi dan menjadi kebutuhan dari lingkungan sini khususnya desa?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah segala kebutuhan dasar, fasilitas dan kenyamanan telah ditemukan dan rasakan disini?
4. Setujukah Bapak/Ibu bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan? Mengapa?
5. Menurut Bapak/Ibu kalau masyarakat ikut membangun desa, apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan tersebut?
6. Disini sudah ada PNPM MP yah, sudah berjalan dari sebelum tahun 2012 dan PNPM masih ada disini sampai sekarang, Bisakah Bapak/Ibu sedikit bercerita tentang PNPM Jatimulyo dan kontribusinya?
7. Bagaimana dulu melakukan musyawarah program pertamakalinya?
8. Program apa saja yang telah dan akan berjalan dalam waktu dekat ini?
9. Seperti yang kita ketahui bahwa PNPM MP sendiri memiliki program-program dan desa sendiri juga memiliki program-program tersendiri. Itu bagaimana Bapak/Ibu melihatnya?
10. PNPM MP Jatimulyo inikan programnya banyak sekali, program-

program itu sendiri bagaimana asalnya?

11. Bapak/ibu inikan anggota BKM Mulyo Lestari, menurut Bapak/Ibu peran apa saja yang bisa dilakukan oleh BKM Mulyo lestari?
12. Selama Bapak/Ibu bertugas adakah kendala yang dihadapi? Seperti apa kendalanya dan bagaimana solusinya serta proses munculnya solusi tersebut?
13. Sekarang berapa jumlah anggota BKM yang tergabung dalam tim berapa persentasenya untuk perempuan?
14. Factor budaya, pernah melahirkan batas-batas ruang gerak bagi kaum laki-laki dan perempuan terkait peran masing-masing. Selama Bapak/Ibu bertugas, pernahkan Bapak/Ibu menemukan anggota BKM wanita merasa minder dalam bekerja karena statusnya adalah wanita? Apa saja peran anggota yang wanita?

Informan Tambahan (Fasilitator PNPM MP Jatimulyo)

Pertanyaan :

1. Menurut bapak/ibu apa alasan utama masyarakat menerima keberadaan PNPM Jatimulyo?
2. Sebagai fasilitator (pendamping yang ditugaskan) di Jatimulyo, menurut bapak/ibu adakah terjadi perubahan pada masyarakat setelah dan sebelum adanya PNPM Jatimulyo? Bisa anda jelaskan perubahan yang seperti apa dan sedikit contohnya?
3. BKM itu sendiri sebenarnya sebuah lembaga atau apa?
4. Untuk perekrutan BKM sendiri seperti apa? Apakah penunjukan atau bagaimana?
5. Kalau untuk komposisi anggota BKM sendiri?
6. Sebenarnya selama ini apa saja kegiatan BKM Mulyo Lestari disini?
7. Menurut bapak/ibu adakah keunikan dari masyarakat ini khususnya Jatimulyo dibanding daerah lain?

8. Kalau untuk PNPM Jatimulyo programnya saat ini apa saja?

Informan Tambahan (Pemdes)

Pertanyaan :

1. Bisa ceritakan soal PNPM Jatimulyo?
2. Pemdes dan BKM kan sudah lama bekerjasama, menurut bapak anggota BKM itu seperti apa?
3. Setahu bapak apa saja kegiatan BKM Mulyo Lestari?
4. Sepengetahuan bapak apa saja yang menjadi kesulitan BKM?
5. Pak saya mendengar bapak sangat mendukung kegiatan BKM disini dan bahkan membuat kegiatan bersama yah pak?
6. Terakhir kalau boleh tahu apa saran dan harapan bapak untuk BKM Mulyo Lestari kedepannya?

Informan tambahan (KSM)

Pertanyaan :

1. Tahukah ibu disini ada PNPM MP?
2. BKM disini kegiatannya apa saja?
3. Masyarakat dan tetangga-tetangga ibu dengan adanya PNPM MP bagaimana bu? Seperti dana pinjaman dari PNPM MP apakah ibu juga meminjam?
4. Bu ini kan PNPM disini sudah lama yah, perbedaan apa yang ibu rasakan dengan adanya PNPM?

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP REDUKSI

Kode	Pembahasan	Reduksi Data
A	<p>Mengorganisasikan Masyarakat Secara Partisipatif</p>	<p>“Untuk perencanaan ini dari bawah itu tadi mbak. Jadi mulai dari RK PS nah itu yang menentukan masyarakat. Nggih (iya) setelah ada usulan itu kan nanti di lakukan survei lokasi seperti kegiatan lingkungan terutama lingkungan nggih (begitu) lingkungan meniko (itu) dilakukan survei lokasi untuk mereng-reng (menafsir) berapa pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan kados (seperti) paving terus saluran nggih nopo (iya apa) rehap rumah malih nggih (lagi) WC”. (AN: Januari 2014)</p> <p>“Ee tidak berpengaruh selama saya mendampingi ee mereka (masyarakat dan BKM) ini ee semua ikut mengambil bagian”. (T: Januari 2014)</p> <p>“Musyawarah di balai desa yang di undang 80 yang datang 62 kan sudah 50% lebih kan itu sudah artinya sudah kuorum itu yang nggak (tidak) datang karena ada halangan. Yang ngundang (mengundang) BKM diedarkan sekertaris ke masyarakat (KSM). Yo (ya) masalah P2KPlah kalau untuk hari ini yah masalah 1M dengan RW 7 heem (iya) terkait PLPBK.” (AP: Januari 2014)</p> <p>“Iya kalau di adakan forum dengan masyarakat itu biasanya kita membicarakan soal program-program</p>

		<p>terus masyarakat didorong memberikan gagasannya. Bagaimana? Iya seperti itu usulan masyarakat nanti ditindaklanjuti di rapat tanggal 13.” (AM: Desember 2013)</p>
<p>B</p>	<p>Dewan Pengambilan Keputusan</p>	<p>“Nopo maneh niki mbak (apa lagi ini mbak), kalau kegiatannya BKM selama ini yah mereka hanya menjalankan program kerjanya. Kalau di ekonomi itu misalkan ada pencairan untuk KSM selain UPK, BKM juga hadir membantu disana selain itu mereka juga yang menentukan kelayakan KSM yang menerima pinjaman mbak jadi proposal-proposal dari KSM itu yang memeriksa (verifikasi) BKM apakah kelompok ini layak diberi dana atau tidak. Iya, kalau ee KSMnya macet kan otomatis nggih (iya) dana juga macet itu mereka harus benar-benar selektif nggih (iya). Nggih (iya) jadi proposal itu dibuat sendiri oleh KSM dan di cek BKM. Dan dana ini di anu di pantau ngoten (begitu) berapa jumlahnya dimasyarakat dan untuk usaha apa. Nggih (iya) nah sifatnya nggih (iya) KSM itukan sifatnya ee kelompok mbak nggih kelompok swadaya masyarakat artinya dalam pengajuan di kegiatan ekonomi itu sesuai yang ada di kegiatan kelompoknya itu memang untuk saat ini untuk KSM di ekonomikan seperti kegiatan usahanya kan masih perorangan belum belum muncul satu kegiatan yang sama itu di kelola bersama-sama artinya anu disini masih ee kegiatan perorangan usaha perorangan jadi 1 KSM itu ada</p>

		<p>kesepakatan membentuk kelompok yang latar belakangnya sama dalam lingkungan setempat lalu mengajukan dana lajeng (setelah itu) itu yang setiap mengajukan dana ke UPK niku membuat proposal sendiri nggih jadi semua kegiatan yang ada di KSM ini untuk pengajuan dananya itu berangkat dari usulan yang kemarin sekaligus proposal hehehe monggo mbak di unjuk. Nggih (iya) kebetulan BKM Jatimulyo merintis prakoperasi nggih (iya) paguyupan kegiatanne nggih (yah) simpan pinjam sing (yang) pinjam nggih BKM UP UP niku (itu), Jadi BKM tidak menyentuh dana BLM mbak. Nggih ada juga mbak BKM ditempat lain yang ikut meminjam dana bergulir, tapi kalau Jatimulyo ini tidak bisa.” (AN: Januari 2014)</p> <p>“Perannya itukan melibatkan diri di setiap programnya P2KP dengan tidak mengharapkan imbalan sepeserpun yah memang tidak dibayar. Yang BKM itu biasanya tim em apa yah perencana. Jadi setiap tanggal 13 itu ada rapat rutin yang dihadiri oleh BKM itu. Agenda utamanya adalah mebicarakan tentang bantuan dana bergulir dan program-program yang ada. Tugasnya iya itu tadi kan di PNPM itu ada PJM jangka pendek menengah nah itukan di yang menyusun itukan BKM atas dasar masukan dari warga. Misal jika ada dana lagi itu akan digunakan untuk apa. Yah menghadiri rapat-rapat karena bersinergi dengan Pemdes berhubungan langsung</p>
--	--	---

		dengan BAPPEDA. Peran utamanya yah merencanakan apa yang akan dilakukan dilingkungan.”(AS: Desember 2013)
C	Mempromosikan Dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur	<p>“Sebelum kegiatan itu <i>ngundang</i> rapat masyarakat (KSM) dulu, masyarakat (KSM dan warga setempat) mengusulkan lingkungannya yang rusak apanya dicatat terus <i>direngking</i> (dirangking) disusun mana yang perlu diprioritaskan.BKM hanya memantau, memberi arahan, membantu mereng-reng kerusakannya. Biar biar nanti dananya tidak dilebih-lebihkan. Usulan itu semua ya dari masyarakat saja”(AS: Desember 2013).</p> <p>“<i>Nggih</i> (iya) penyamaannya itu nanti dari masyarakat masing-masing ee kriteria disepakati secara keseluruhan, maksudnya ditingkat desa itu ada kesepakatan bahwa ini loh yang masuk kriteria. Setelah disepakati lalu diproses BKM. Misalnya untuk kegiatan ekonomi bergulir BKM melakukan pengecekan usaha yang dilakukan KSM apakah benar ada, kurang apa nanti dibantu lagi, bagaimana usahanya. Jadi BKM memastikan agar bantuan ini tepat”(AN: Januari 2014)</p>
D	Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan	<p>Ekonomi :</p> <p>“Kalau di ekonomi itu misalkan ada pencairan untuk KSM selain UPK BKM juga hadir membantu disana selain itu mereka juga yang menentukan kelayakan KSM yang menerima pinjaman mbak jadi proposal-proposal dari KSM itu yang memeriksa BKM apakah</p>

		<p>kelompok ini layak diberi dana atau tidak. Iya, kalau ee KSM-nya macet kan otomatis nggih dana juga macet itu mereka harus benar-benar selektif nggih. Nggih jadi proposal itu dibuat sendiri oleh KSM dan di cek BKM. Dan dana ini di anu di pantau ngoten berapa jumlahnya dimasyarakat dan untuk usaha apa”(AN: Januari 2014)</p> <p>“Tahun 2012 kemarin untuk kegiatan sosial itu untuk pelatihan pelatihan pakan ternak itik terus setelah itu juga ada untuk penambahan gizi balita kalau yang di penambahan gizi balita ini diambilkan dari dana alokasi mbak jadi bukan dana dari BLM dari hasil laba UPK setiap tahun itu dialokasikan untuk kegiatan lingkungan sosial terus penambahan ekonomi kalian pengawas di UP. Jadi laba dari pinjaman UPK itu setiap akhir tahun dialokasikan untuk kegiatan itu” (AN: Januari 2014).</p> <p>“Kalau saya boleh berkomentar, kesulitan itu pasti ada. Seperti rapat BKM malam kemarin ada segelintir KSM yang nunggak. Ini masalah, kita upayakan pengembalian KSM ini selalu lancar. Kemarin itu sudah didatangi tapi masih janji-janji, rencananya saya akan kesana janji-janji biar jelas kenapa kok nunggak.”(AM: Desember 2013)</p> <p>Lingkungan:</p> <p>“Program-programnya kan ada tiga itu fisik (lingkungan), sosial dan ekonomi. Fisiknya direalisasikan dengan pembangunan rumah atau</p>
--	--	---

		<p>daerah kumuh yang kemudian di jadikan tidak kumuh, yang belum sehat di sehatkan yang biasanya buang air di sungai sekarang tidak lagi.”(AS: Desember 2013).</p> <p>“Apa lagi yah mbak, yah hanya itu seperti melebarkan jalan, rapat BKM soal lingkungan, rapat undangan kantor desa, ini PLPBK masih setengah saya di bagian WC dengan mbak I”. (AP: Januari 2014)</p> <p>Sosial :</p> <p>“Setelah proses itu dilalui (tahap persiapan) kemudian ee masyarakat se-Jatimulyo melakukan pemetaan swadaya yang isti..singkatanipun (istilahnya) PS. Nggih (iya) didalam PS niku (itu) masyarakat menggali potensi yang ada dilingkungan masing-masing ada persoalan terkait lingkungan sosial maupun tingkatan ekonomi. Jadi persoalan disitu apa disetiap masing-masing RT itu melakukan kajian permasalahannya apa terus solusinya bagaimana itu dituangkan dalam ee kegiatan PS. Termasuk milah-milah (memilah-milah) KK miskin, KK miskin yang termasuk dilingkunganne (dilingkungannya) misalkan lingkungan Patek nggih (iya) RW 7 niku (itu) yang masuk KK miskin niku (itu) sinten. Niku (itu) juga melihat acuan dari hasil RK yang terdahulu. Ciri-ciri kemiskinan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Nggih (iya) kriteria kemiskinan niku (itu) yang menentukan masyarakatnya mbak tapi juga dilihat untuk nopo acuan nipun (apa acuannya) juga bisa dari</p>
--	--	---

		<p>data desa. Misalkan dari program nopo (apa) JAMKESMAS ataupun PKH bisa dijadikan acuan”. (AN: Januari 2014).</p> <p>“Ada banyak kambing bergulir, unggas bergulir rehab rumah santunan dari apa itu posyandu itu dari P2KP juga ada bantuan banyak mbak program”(AP: Januari 2014).</p> <p>“Kalau sosialpun juga banyak seperti beasiswa anak sekolah kemudian <i>anu ee</i> orang jompo, memberikan santunan anak yatim, beasiswa untuk anak SMP terus memberikan pinjaman modal di ekonomi bergulir”.(AS: Desember 2013)</p>
<p>E</p>	<p><i>Networking/</i> mengembangkan jaringan</p>	<p>“Selain PLPBK juga ada kegiatan chaneling dengan satuan-satuan kerja yang ada di daerah Tulungagung tapi ini dalam proses. Kita disuruh sabar menunggu hasil chaneling, agar desa ini bisa berubah positif sesuai dengan visi misi BKM Mulyo Lestari” (AM: Desember 2014).</p> <p>“Setahu saya Pemdes itu juga sangat mendukung dengan adanya PNPM itu buktinya ada AGDnya desa bisa digabungkan untuk mengambil dana yang lebih besar dari Pemda. Karena ada sayembara dari Pemda itu jika ada yang bisa mewujudkan 25% dana itu prosentasenya 25% dari desa 75% dari Pemda itu akhirnya di gabung 100% untuk diambil dana yang 100% itu. Oh awalnya begini saling punya ego sendiri-sendiri dari BKM merasa punya dana dan Pemdes juga akhirnya ada benturan tapi ahirnya</p>

		<p>masing-masing itu sadar kita akan membangun desa jadi membangun desa itu tidak mungkin membangun sendiri-sendiri dan yang diambil itu butuh pancingan dari Pemda itu iniloh ada dana 100% ambilah dengan dana 25% kalau bisa bawa pulang ini 100%. Dulu itu dari Pemda itu ada dana seratus juta terus dari desa itu harus punya 25% dari seratus juta itu agar bisa melakukan pavingisasi disini. Pemerintah sudah ada anu programm sharing dari PNPM MP itu otomatis program PNPM itu program desa juga.” (AS: Desember 2014)</p> <p>“Kita dan PNPM (BKM) ya mengajukan proposal kerja sama dengan pabrik X yah untuk membantu penerangan jalan yang ada disebelah selatan, ya mulai dari rumah bapak X sampai jalan setono waru kuburan situ mbak. <i>Hoooh</i> (iya) situ kan ya masih sedikit lampunya apa lagi jalan besar. Ya ini kan <i>anu</i> kemarin itu pak X yang pernah kerja di pabrik X itu ya bilang kalau pabrik bisa bantulah soalnya ada program apa ya itu CSR. Sebelum jadi lurah saya kan juga kerja disitu mbak hehehe jadi ya <i>insyaallah</i> bisa mbak bantuannya. Apa lagi kalau pas <i>wayahe</i> (waktunya) gilingkan debunya itu terbang ke utara <i>ta</i> (kan) otomatis jatuhnya juga di sini hehehe”.(SG: Januari 2014)</p>
<p>F</p>	<p>Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM</p>	<p>“Kalau dibangunan (program kegiatan lingkungan) saya selalu datang, tapi percaya atau tidak mbak orang sebanyak itu hanya saya yang perempuan</p>

		<p>disana. Jalan yang jurusannya Ngedok (Desa tetangga) itu setiap hari saya kesana menunggu (memantau kegiatan) sendiri mbak. Namanya perempuan membantu sebisanya apa yang perlu.” (AP: Januari 2014)</p> <p>“Biasanya dibahas waktu tanggal 13 itu bersama faskel dan anggota (BKM) lain juga ada perangkat dan kepala desa. Yah semuanya soal lingkungan, ekonomi semua program.”(AS Desember 2013)</p>
--	--	---



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.
Wawancara
dengan
informan AM



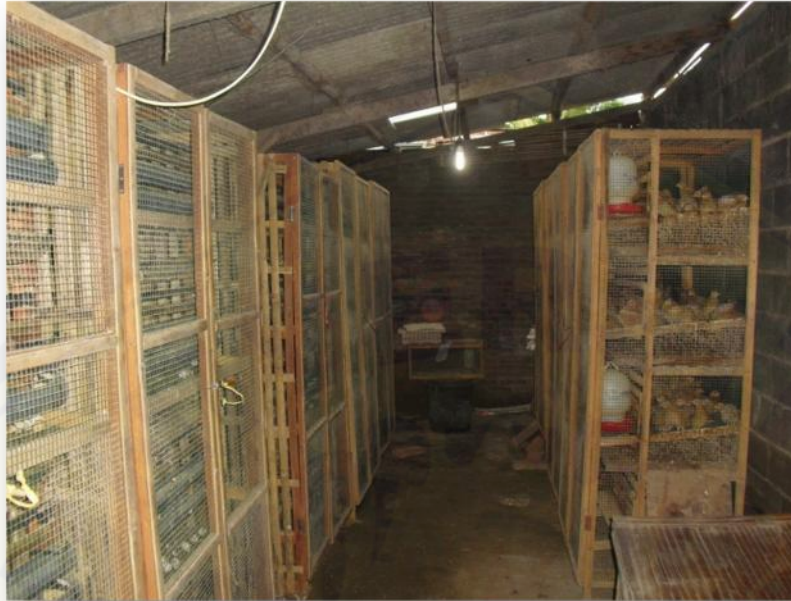
Gambar 2.
Wawancara
dengan
informan SG



Gambar 3.
Rapat warga
bersama BKM



Gambar 4.
Informan AP
mengawasi
proses
pelaksanaan
realisasi
program
lingkungan.



Gambar 5.
Realisasi
program
sosial ternak
puyuh



Gambar 6.
Pelatihan
KSM dan
RTRW



Gambar 7.
Pencariran
ekonomi
bergulir



Gambar 8.
Rapat rutin
anggota BKM



Gambar 9.
Evaluasi kegiatan lingkungan di rumah warga (lokasi kegiatan di RW 7).



Gambar 10.
Informan NS bersama dengan warga yang lain menyusun program lingkungan.

LAMPIRAN 6

PROGRAM KERJA BKM MULYO LESTARI TAHUN 2013

No	Kegiatan	Tujuan	Sumber dana	Penanggung jawab
I	RAPAT KOORDINASI			
1	Rapat Koordinasi BKM, PemDes, PJOK	Kesatuan pendapat dan program	BOP	BKM, PEMDES
2	Rapat Koordinasi BKM	Kesatuan pendapat dan program	BOP	BKM
II	PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF			
1	Tinjauan Kelembagaan BKM	Status kelembagaan BKM	BOP	BKM
2	PJM	Penyusunan PJM	BOP, Swadaya	BKM
3	Review AD dan ART BKM	Tersusnya AD dan ART BKM yang baru	BOP	BKM
4	Review Keuangan	Tercapainya pertanggungjawaban dan kesesuaian aturan pembukuan	BOP	BKM
III	PEMANFAATAN BLM			
1	Pemanfaatan BLM Reguler	Pelaksanaan pemanfaatan BLM harus tepat sasaran dan tepat metode.	BLM Reguler, Swadaya	BKM, UP, KSM
2	Pemanfaatan BLM APBNP	Pelaksanaan pemanfaatan BLM harus tepat sasaran dan tepat metode.	BLM APBNP, Swadaya	BKM, UP, KSM
3	Pemanfaatan BLM PAKET	Pelaksanaan pemanfaatan BLM harus tepat sasaran dan tepat metode.	BLM PAKET, Swadaya	BKM, PAKEM, PEMDES
4	Pemanfaatan PLPBK	Pelaksanaan pemanfaatan BLM harus tepat sasaran dan tepat metode.	BOP PLPBK, Swadaya	BKM, TIPP/TP/TPP, PEMDES

IV	PENGAWASAN DAN EVALUASI			
1	Audit Independen Keuangan BKM	Tercapainya pelaksanaan pembukuan sesuai dengan kaidah.	BOP	BKM, Auditor
2	Kemitraan dengan Dinas Kesehatan / Lembaga Lain	Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita	Dana Sosial dari Alokasi Jasa	BKM, PEMDES, KSM
3	Kemitraan dengan Dinas Koperasi / Lembaga Lain	Mendirikan KSU (Koperasi Serba Usaha), dan pemberian Kredit Usaha	Iuran Anggota dan Sumber lain	BKM, PEMDES, PAKEM
VIII	KEGIATAN AKHIR TAHUN			
1	Rembug Warga Tahunan LPJ BKM	Transparansi dan pertanggungjawaban BKM kepada masyarakat	BOP, Swadaya	BKM, PEMDES
2	Penyusunan Program Kerja BKM 2013	Tersusunnya Program Kerja BKM 2013	BOP	BKM
3	Penyusunan RAPB tahun 2013	Tersusunnya RAPB BKM 2013	BOP	BKM
IX	PEMILU BKM (SIKLUS IV)			
1	Refleksi kemiskinan 3 Tahunan	Tersusunnya data kemiskinan yang baru	BOP, Swadaya	BKM
2	RK (Refleksi Kemiskinan)	Tersusunnya data kemiskinan yang baru	BOP, Swadaya	BKM, Pemdes
3	PS (Pemetaan Swadaya) Ulang	Tersusunnya daftar PS yang baru	BOP, Swadaya	BKM, Pemdes
4	Pembentukan POKJA-POKJA Pemilu	Terbentuknya POKJA-POKJA Pemilu	BOP	BKM
5	Pemilihan Umum PK BKM	Pemilihan anggota PK BKM baru	BOP	BKM
X	PENGAWASAN UPK			
1	Kinerja pengawas UPK	Pengawasan yang intensif terhadap kinerja Pengawas UPK	Dana Pengawasan	BKM

3	Review keuangan	Pengawasan yang intensif terhadap kinerja UPK	Dana Pengawasan	BKM
XI	KEGIATAN PLPBK			
1	Perencanaan partisipatif dan pemasaran	<p>a. Terlaksananya kegiatan/ proses perencanaan (Aturan Bersama, RPLP dan RTPLP) oleh Pemda dan Masyarakat</p> <p>b. Penetapan kawasan prioritas</p> <p>c. Harmonisaasi dan Integrasi rencana</p> <p>d. Dokumen program/proyek yang disepakati masyarakat & pemerintah</p>	BLM PLPBK, Swadaya	BKM, TIPP/TP/TPP, PEMDES, PEMDA
2	Pelaksanaan pembangunan	<p>a. Praktek manajemen pembangunan oleh warga</p> <p>b. Dukungan program/proyek dari pemerintah</p> <p>c. Manajemen pembangunan berkelanjutan secara mandiri oleh warga</p>	BLM PLPBK, Swadaya	BKM, TIPP/TP/TPP, PEMDES, PEMDA

Tulungagung, 30 Desember 2013

**Kepala Desa
Jatimulyo**

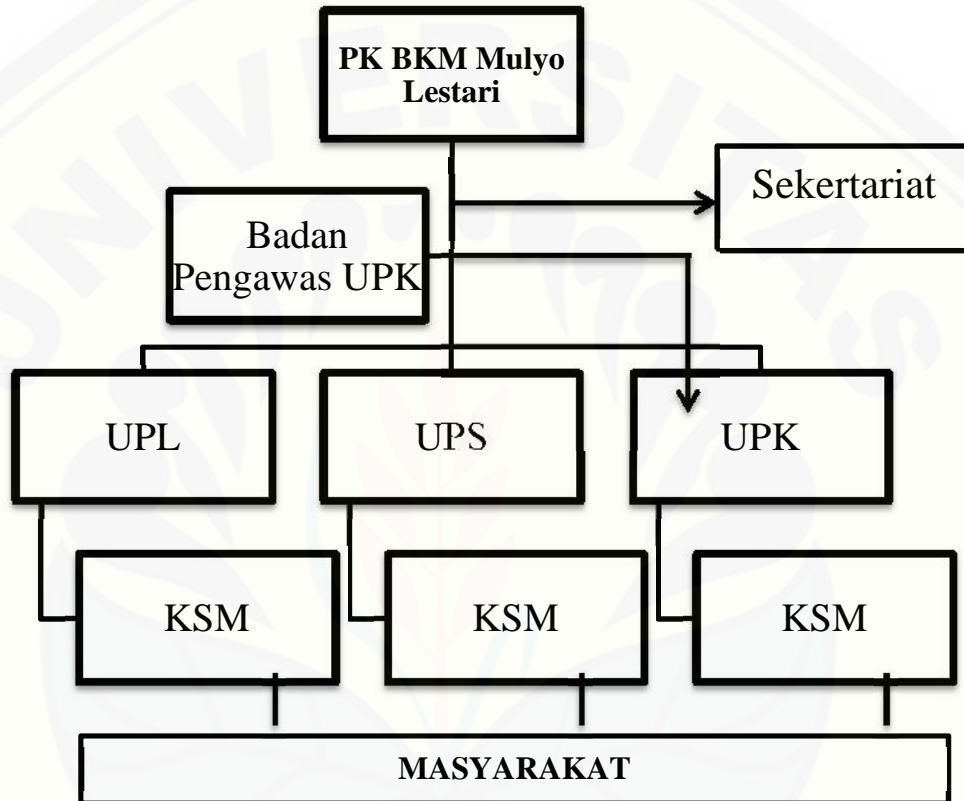
**Pimpinan Kolektif
Bkm Mulyo Lestari**

Bekti Sasongko, St

**Drs Mustamat
Koordinator**

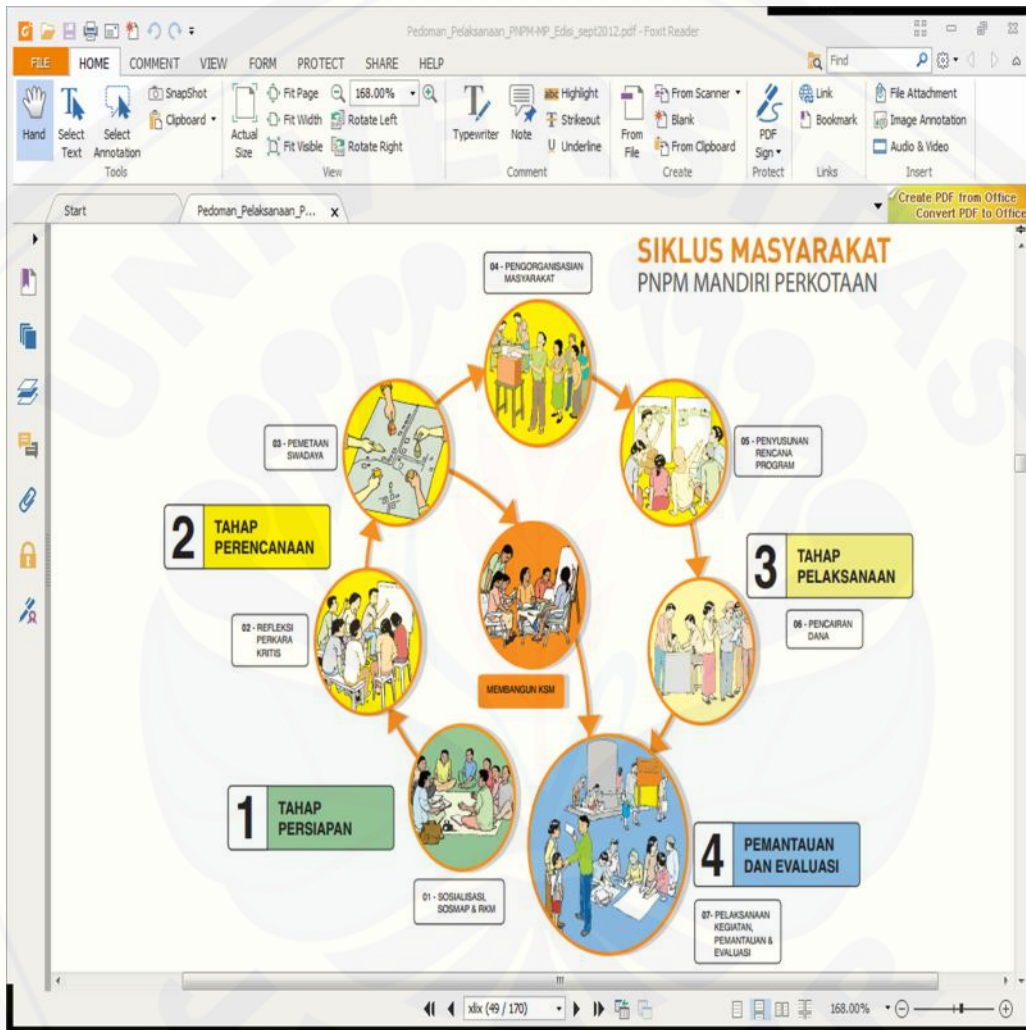
LAMPIRAN 7

Struktur Organisasi PK BKM Mulyo Lestari Tahun 2013



LAMPIRAN 8

SIKLUS PNPM MP



Sumber: Buku Pedoman pelaksanaan PNPM MP, 2012

Keterangan:

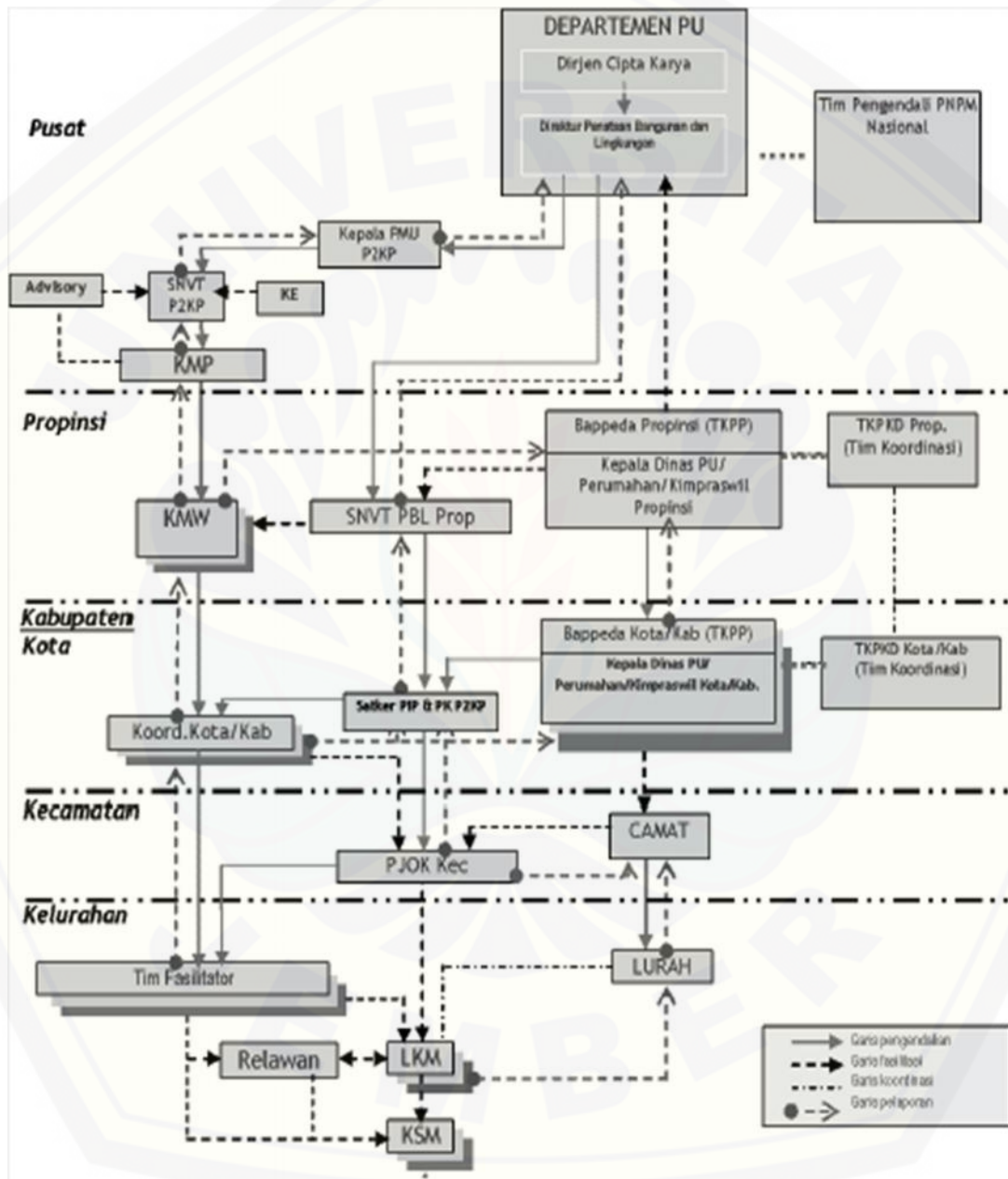
No	Tahapan	Tujuan	
		Sklus tingkat dasar	Siklus tingkat lanjutan
1	Tahap Persiapan		
	Sosialisasi Dan Pemetaan Sosial	Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat, Penyebarluasan informasi tentang akan adanya program PNPM MP di desa/kelurahan tersebut.	Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat, Penyebarluasan informasi tentang akan adanya program tambahan/khusus.
	Rebug Kesiapan Masyarakat (RKM)	Membangun komitmen masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.	Pembaharuan komitmen masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan
2	Tahap Perencanaan		
	Refleksi perkara kritis: RK, refleksi bencana, refleksi kemiskinan dan gender, refleksi kawasan padat dan miskin, dsb.	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kesadaran tentang masalah bersama: kemiskinan yang harus ditangani. • Menemukan akar penyebab kemiskinan • Membangun niat bersama menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kesadaran tentang masalah bersama: kemiskinan yang harus ditangani, pembangunan yang harus ditanggulangi bersama. • Menemukan akar penyebab kemiskinan, kesenjangan gender, persoalan bencana, dsb. • Membangun niat bersama menanggulangi berbagai permasalahan kemiskinan secara terorganisasi.
	Pemetaan Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat. • Membangun motivasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat. • Membangun motivasi untuk menyelesaikan

		<p>untuk menyelesaikan persoalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan data-data dan informasi lingkungan. 	<p>persoalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan pemutakhiran data-data dan prioritas pembangunan.
	Pengorganisasian Masyarakat (BKM/LKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan kriteria kepemimpinan moral. • Tata cara menemukan orang-orang baik dan tulus. • Terbentuknya lembaga kepemimpinan yang representatif dan mengakar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan lembaga masyarakat yang berkinerja baik, kreatif dan inovatif. • Menghasilkan unit-unit pelaksana yang handal sesuai kebutuhan.
	Penyusunan Rencana Program	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan BKM yang mampu melaksanakan penyusunan rencana program. • Tersusunnya program pembangunan kelurahan yang berorientasi pada lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghasilkan BKM yang mampu melaksanakan penyusunan rencana program yang lebih komprehensif. • Tersusunnya program pembangunan kelurahan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan permukiman yang lebih baik.
	Pemasaran Program	Terlaksananya pemasaran sosial tentang rencana program kepada seluruh pihak (masyarakat, pemda dan stakeholder)	Terlembaganya pemasaran sosial tentang rencana program kepada seluruh pihak (masyarakat, pemda dan stakeholder)
3	Tahap Pelaksanaan		
	Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KSM. • Terbentuknya KSM ekonomi yang sudah memiliki kegiatan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • KSM yang berorientasi pada penaggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan yang lebih baik.

			<ul style="list-style-type: none"> • KSM ekonomi yang sudah memiliki kegiatan bersama dan kerjasama dengan berbagai pihak.
	Penerima Manfaat	Penerima manfaat adalah warga miskin yang dalam data pemetaan swadaya, yang terinci dalam lembar PS2 terbaru (<i>update</i>) yang telah disepakati warga.	Penerima manfaat adalah warga miskin yang dalam data pemetaan swadaya, yang terinci dalam lembar PS2 terbaru (<i>update</i>) yang telah disepakati warga.
4	Pemantauan dan Evaluasi		
	Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan dan tanggung gugat • Terbentuk kepedulian masyarakat untuk memantau kemajuan program secara berkala dan mandiri. • Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. • Pengendalian sosial 	melembaganya keterbukaan dan tanggung gugat. melembaganya proses pemantauan dan partisipasi masyarakat. melembaganya pengendalian sosial
	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahuinya kualitas proses dan hasil program per tahap evaluasi. • Diketahuinya kesesuaian dengan pedoman, peraturan dan nilai-nilai setempat. • Diketahuinya kesesuaian dengan tujuan program. • Dilakukannya tindak lanjut hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahuinya kualitas proses dan hasil program per tahap evaluasi. • Diketahuinya kesesuaian dengan pedoman, peraturan dan nilai-nilai setempat • Diketahuinya kesesuaian dengan tujuan program.

LAMPIRAN 9

Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan



Lampiran 10



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto telp (0331) 335586 – 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : ~~664~~ /UN25.1.2/SP/2013

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Pendidikan menugaskan kepada nama dosen tersebut di bawah ini :

Nama : **Drs. Djoko Wahyudi, M.Si**
NIP : 195609011985031004
Jabatan : Lektor
Pendidikan Tertinggi : Strata 2
Sebagai : Pembimbing

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

N a m a : Imroatus Solekah
N I M : 090910301023
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dengan judul tugas akhir : Peran Relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Jember, 14 November 2013

Pembantu Dekan I,

Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :
1. Dosen pembimbing
2. Akademik
3. Mahasiswa ↓

Lampiran 11



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1869/UN25.3.1/LT.5/2013 06 Desember 2013
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Nomor : 6909/UN25.1.2/LT/2013 tanggal 4 Desember 2013, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Imroatus Solekah / 090910301023
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Bangka II No. 18 Jember / No. Hp. 083813530073
Judul Penelitian : Peran Relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)
Lama Penelitian : Dua Bulan (06 Desember 2013 – 06 Februari 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 12



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Nomor : 072/3370 / 407.204 /2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian/Survey

Tulungagung, 23 Desember 2013
Kepada
Yth. Sdr. Camat Kauman

di
KAUMAN

Menunjuk Surat : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
Tanggal : 6 Desember 2013
Nomor : 1869/UN25.3.1/LT.5/2013

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : IMROATUS SOLEKAH
Alamat : Ds Jatimulyo Kec. Kauman Kab. Tulungagung
Kebangsaan : Indonesia

Yang bersangkutan diberikan ijin untuk mengadakan Penelitian/survey:
Judul : " Peran Relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

Pengikut : -
Waktu : 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal surat dikeluarkan
Lokasi : Desa Jatimulyo Kec. Kauman Kab. Tulungagung
Keterangan :
1. Peserta survey wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat survey
2. Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat.
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya survey harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.
4. Apabila tidak melaporkan hasil survey maka Bakesbang dan Politik akan mengirim surat kepada yang bertanggungjawab menugaskan survey bahwa hasil survey tersebut cacat hukum.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 / Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres / Kasat Intelkam Tulungagung
3. Sdr. Ka BAPPEDA Kab. Tulungagung
4. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
5. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran 13

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KAUMAN
DESA JATIMULYO

Kode 66261

SURAT KETERANGAN

NO: 471 / 2014 / 415.13 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IMROATUS SOLEKAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : Tulungagung, 05-04-1991
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
NIM : 090910301023
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Universitas : Universitas Jember

Menerangkan bahwa orang tersebut benar-benar penduduk Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dan **menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Jatimulyo selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 23 Februari 2014 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Relawan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Jatimulyo (Studi Deskriptif) di Desa Jatimulyo Kec. Kauman, Kab. Tulungagung.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatimulyo, 23 Februari 2014

Kepala Desa Jatimulyo


SUGIYONO

Lampiran 14



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KECAMATAN KAUMAN

Jalan KH. Hasyim Asyari Telepon Nomor : 322613 KAUMAN Kode Pos 66261.

Kauman, 24 Desember 2013

Nomor : 072/504/415/2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian/ Survey/ Research

Kepada
Yth. Sdr. IMROATUS SOLEKAH
Desa Jatimulyo
Kecamatan Kauman
Di

KAUMAN

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 072/3320/407.204/2013 perihal sebagaimana pada pokok surat, pada dasarnya kami **tidak keberatan** Saudara melaksanakan Survey / Penelitian / Research di **Desa Jatimulyo** Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung selama 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan dengan catatan :

1. Peserta Survey wajib mantaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat research.
2. Pelaksanaan Penelitian/ Survey/Research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat.
3. Hasil survey baik langsung maupun tidak langsung tidak dipergunakan untuk tindak kriminal.
4. Jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukanya Survey harap melaporkan hasilnya kepada PEMKAB Tulungagung Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Desa Jatimulyo


AGUS SUSWANTORO, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19690813 198903 1 003